

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

KEBIJAKAN RRC TERHADAP PEMILU TAIWAN TAHUN 1996  
DAN DAMPAKNYA BAGI PROSES REUNIFIKASI

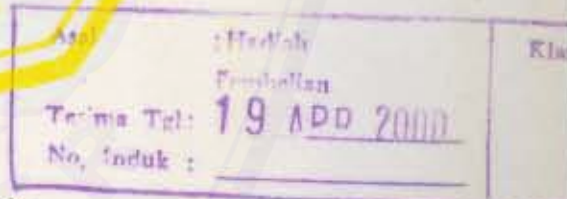
SKRIPSI



Disajikan Guna memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S I)  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

S  
324.699 25  
HiD  
R  
e.1



Oleh :

*Yuristiarso Hidayat*

9209101217

Pembimbing :

Drs. Sjoekron Syah, SU

NIP. 130325930

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

2000

LEMBAR PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan di depan team penguji skripsi  
Guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh  
gelar sarjana Strata Satu (S-1)  
Jurusan ilmu Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

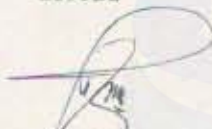
Pada :

Hari/tanggal : Selasa, 29 Februari 2000

Jam : 10.00 Wib

Panitia Penguji

Ketua



Drs. Asrial Azis  
Nip 130 355 413

Sekretaris



Drs. Sjoekron Sjah, SU  
Nip 130 325 930

Team Penguji


Drs. Asrial Azis

(Ketua)

(  )

Drs. Sjoekron Sjah, SU

(Sekretaris)

(  )

Drs. H. Nurudin M. Yasin

(Anggota)

(  )

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember



Prof. Drs. H. Bariman  
Nip 130 350 769

Motto :

- Hai orang-orang yang beriman; bersabarlah dan bertahanlah dalam kesabaran dan tetaplah bersiap siaga dalam pertahananmu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu untung, bahagia dan jaya\*

QS Ali Imron, ayat 200

- Siapapun bisa marah, marah itu mudah, tetapi, marah pada orang yang tepat; dengan kadar yang sesuai; pada waktu yang tepat; demi tujuan yang benar terlebih dengan cara yang baik- itu bukan hal yang mudah\*

Aristoteles

- Alon-alon waton kelakon\*

Pepatah Jawa

\* *Terjemahan Al Quran*, CV Al Qalam, Surabaya 1995, hal 77

\* Daniel Goleman, *Emotional Intelligence*, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. IX

\* Umar Kayam, *Mangan Ora Mangan Kompal*, Gramedia Pustaka Utama 1994, hal 12

## PERSEMBAHAN

*Karya ini Penulis persembahkan untuk :*

- *Utamanya, buat Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah lama menanti dan tiada henti medo'akan agar semua ini terwujud.*
- *Mas Pungki dan Mbak Anna yang telah ikut membimbing dan tentunya membantu penulis selama di Jember. Tak lupa buat Dina, Desy dan Ardan salam sayang.*
- *Mas Uki dan Mbak Diah yang tentunya selalu berharap 'ini' bisa terwujud pula.*
- *Dia-nya yang telah,... dan akan terus mengisi hatiku, yang membuat-ku bertahan, thank's a lot.*
  - *Jember dan almamater, serta Himpunan-ku yang telah menempaku sekian lama.*

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang tepat selain puji syukur kehadirat Allah SWT, dzat yang maha besar, penguasa jagat semesta. Dan hanya berkat rahmad, taufiq serta curahan ridlo-Nya lah karya tulis yang sangat sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat terselesaikan setelah sekian waktu terbengkalai.

Selanjutnya Sholawat dan salam hendaknya selalu tercurah kepada kekasihNya yang utama, sang Uswatun Hasanah, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga usaha-usaha yang telah beliau kerjakan dalam rangka proses pencerahan umat manusia dapat tetap diteruskan oleh para pengikutnya. Amien.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, skripsi ini akhirnya dapat 'terselesaikan'. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian 'ini' tidak hanya sebatas formalitas demi meraih status belaka tetapi lebih merupakan ungkapan dari rasa tanggung jawab sebagai seorang --mahasiswa – yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan yang tidak terbatas pada dirinya semata, tetapi terhadap proses perkembangan bangsanya.

Penulis sadar bahwa karya ini tidaklah akan ada tanpa keterlibatan pihak-pihak yang selalu komit terhadap kerja-kerja intelektual dan selayaknya bila pada kesempatan ini Penulis ingin menumpahkan rasa terima kasih sebagai ungkapan hormat dan penghargaan terhadap pihak-pihak yang telah berperan besar hingga terlahirnya karya ini.

Pertama tentunya pada seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, utamanya **Bapak Drs Sjoekron Sjah, SU** sebagai Ketua Jurusan HI dan tentunya sebagai Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabar memotivasi dan menjadi tempat penulis bertanya. Selanjutnya kepada **Bapak Prof. Drs. H. Bariman** selaku Dekan FISIP Universitas Jember yang telah memberi warna positif pada kampus. Tak lupa pula kepada **Bapak Drs. Asrial Azis**, yang telah dengan tekun membimbing dan memberikan arahan dalam perwalian di tiap semester.

Selanjutnya kepada **Kanda Drs. A. Kholik Asyari, MA.** yang telah memperkenalkan proses penelitian yang kredibel. **Kanda Drs. Himawan Bayu**, serta **Kanda Agustri** yang tiada jenuh menemani berdiskusi tentang berbagai topik.

Terima kasih secara khusus, harus penulis sampaikan kepada **Mbak Wiwik Zuhro, MA** yang telah memberikan banyak bahan dan masukan selama penulis di Jakarta. Dan tentunya **Mas Nekad** sekeluarga yang telah bersedia 'memfasilitasi' penulis dalam proses *finishing touch*.

Tak lupa kepada *senior-senior* yang telah memberi transformasi nilai dan warna tersendiri dalam cakrawala fikiran penulis. Khususnya **Mas Ganefo, Mas Ja'po**, dan **Mas Kris** serta **Mas Dien**, yang memberi kesempatan dan amanahnya. Thank's a lot.

Kepada saudara-saudara-ku **Yun'am, Hafid, Furqon, Agung** dan **Muamal** atas bantuan dan dedikasinya sebagai teman dan mitra berproses. Dan juga tak ketinggalan teman-teman **Badko, Rudolfo, Jamadi, Nugroho, Evi, Mohtar, Wahyu Sn** dan **Jaki**, terima kasih untuk kebersamaannya.

Terakhir kepada all my young brothers and Sisters in HMI, **Win, Yanto, Dini, Agus, Fai, Risa, Emi, Barid, Milda, Roni, Reni, Febi, Soni** dan seluruh *komponen 96* dan segenap keluarga besar *kom-fis* dan HMI Cab. Jember serta tak lupa kepada semua pendukung *Bangsawan*, yang telah mengisi waktu-waktu perkaderan selama ini. Semoga *'Api itu'* masih tetap menyala. Amien.

Penulis menyakini sepenuhnya bahwa dalam karya tulis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis membuka diri bagi adanya masukan dari segenap pihak demi kesempurnaannya. Dan akhirnya hanya mengharap semata-mata limpahan ridho-Nya, semoga karya ini dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak utamanya bagi pembangunan budaya intelektual.. Amien. Sekian dan terima kasih.

Jember, 19 Februari 2000  
Penulis

YURISTIARSO HIDAYAT

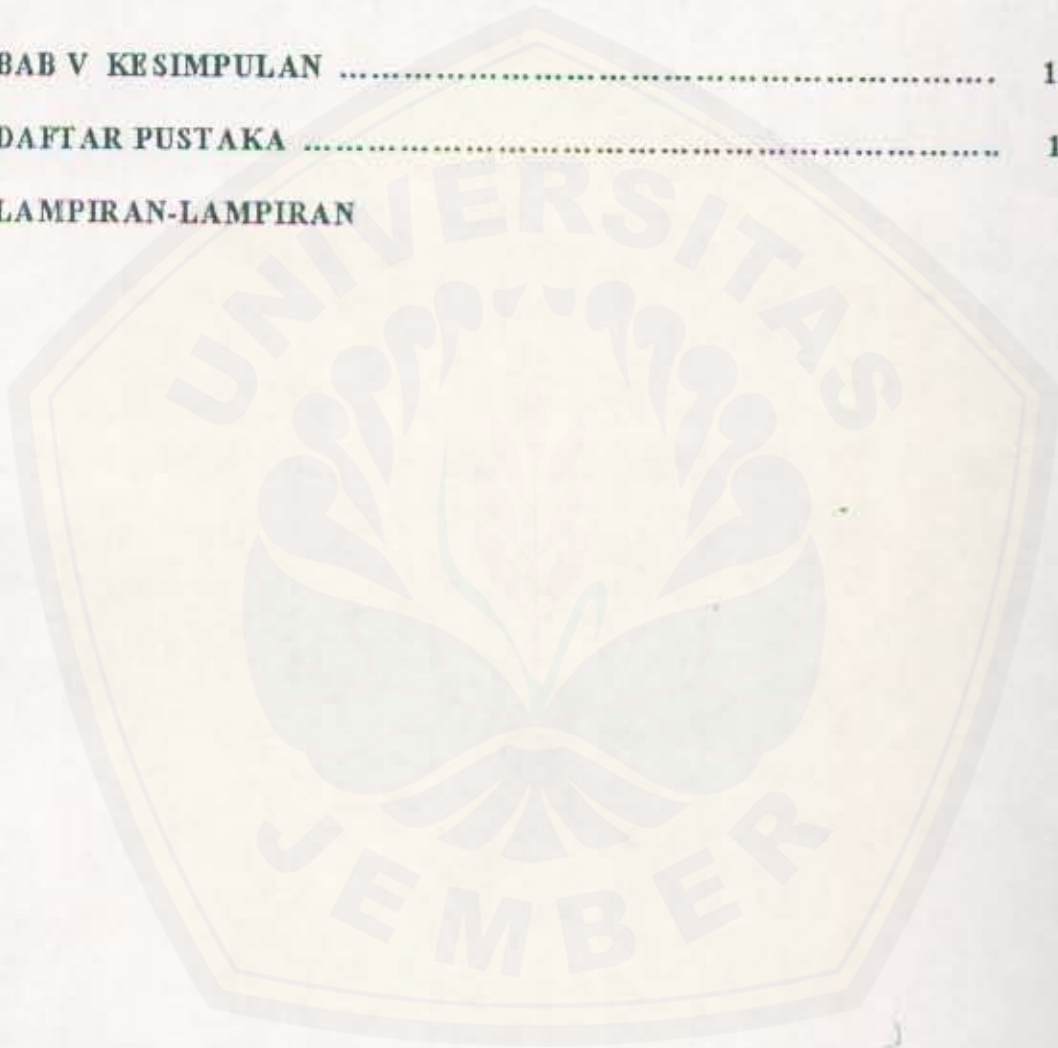
DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
BAB I P E N D A H U L U A N .....	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul .....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....	8
1.2.1 Aspek Materi .....	10
1.2.2 Aspek Waktu .....	11
1.3 Problematika .....	11
1.4 Kerangka Dasar Teori .....	13
1.5 Hipotesa .....	18
1.6 Metode Penelitian .....	19
1.6.1 Metode Pengumpulan Data .....	20
1.6.2 Metode Analisa .....	20
1.7 Pendekatan .....	22
BAB II DUA CINA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH .....	23
2.1 Keterkaitan Taiwan Dalam Historis Cina .....	23



2.2	Konflik Dua Cina Dalam Tinjauan Historis .....	26
2.2.1	Dari Monarki Menuju Republik .....	27
2.2.2	Kemenangan Komunis dan Berdirinya Republik Rakyat Cina (People Republic of China) .....	37
2.2.3	Menyingkir Ke Taiwan Dan Menjadi Naga Asia .....	41
<b>BAB III</b>	<b>DUA CINA DALAM PROSES REUNIFIKASI .....</b>	<b>49</b>
3.1	Kepentingan Cina Terhadap Taiwan .....	49
3.2	Perimbangan Kekuatan Militer Dua Cina .....	55
3.2.1	Profil Militer RRC .....	55
3.2.2	Profil Militer Taiwan .....	58
3.3	Sikap Cina Terhadap Taiwan Menuju Reunifikasi .....	63
3.4	Hambatan-Hambatan Reunifikasi .....	71
3.5	Alternatif-Alternatif Solusi Konflik Dua Cina .....	74
<b>BAE IV</b>	<b>PEMILU TAIWAN DAN DAMPAKNYA BAGI DUA CINA ...</b>	<b>76</b>
4.1	Peran Amerika Serikat Terhadap Konflik Dua Cina Pasca Normalisasi AS-RRC (Cina Era Deng Xiaoping) .....	76
4.2	Pola Hubungan Cina-Taiwan (1979-1996) .....	83
4.2.1	Hubungan Cina-Taiwan (1979-1989) Era Deng Xiaoping- Chiang Ching Kou .....	85

4.2.2 Hubungan Cina-Taiwan (1989-1996) Era Deng Xiaoping- Lee Teng Hui .....	94
4.3 Pemilu Presiden Taiwan Tahun 1996 Dan Sikap RRC .....	104
4.4 Dampak Pemilu Taiwan Bagi Proses Reunifikasi .....	113
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>116</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	KEKUATAN ANGKATAN UDARA CINA .....	56
Tabel 3.2	KEKUATAN ANGKATAN LAUT CINA .....	57
Tabel 3.3	KEKUATAN ANGKATAN DARAT CINA .....	58
Tabel 3.4	KEKUATAN ANGKATAN UDARA TAIWAN .....	59
Tabel 3.5	KEKUATAN ANGKATAN LAUT TAIWAN .....	60
Tabel 3.6	KEKUATAN ANGKATAN DARAT TAIWAN .....	61
Tabel 3.7	PERIMBANGAN KEKUATAN MILITER CINA-TAIWAN .....	62
Tabel 4.1	HASIL PEMILIHAN PRESIDEN TAIWAN 23 MARET 1996 ...	111

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Berakhirnya Perang Dingin ternyata tidak menjamin meredanya ketegangan di kawasan tertentu. Kawasan Asia terutama Asia Timur merupakan kawasan yang memiliki potensi konflik cukup tinggi. Konflik antara dua Korea, Jepang-Korea, Jepang-Cina masih cukup rawan. Dan di awal 1996, kawasan ini kembali mengalami ketegangan yang cukup tinggi dengan meletusnya konflik lama. Konflik ini terjadi antara pemerintahan Republik Rakyat Cina dengan Pemerintahan Nasionalis Cina. Lebih jauh konflik ini dikenal dengan istilah *konflik dua Cina*.

Konflik dua Cina merebak kembali disebabkan oleh akan berlangsungnya proses pemilihan umum (Pemilu) di Taiwan yang akan berlangsung pada 23 Maret 1996. Pemilu Presiden ini merupakan yang pertama dilakukan di Taiwan, yang sebelumnya pergantian Presiden tidak melalui proses demokratis tersebut. Adanya pemilu tersebut merupakan pemicu ketegangan di kawasan ini. Hal ini terutama bagi pihak Republik Rakyat Cina, dianggap sangat membahayakan terhadap tatanan dan kestabilan geo-politik wilayah tersebut.

Sikap pemerintah Republik Rakyat Cina sangat keras terhadap adanya pemilu presiden di Taiwan, pihak Beijing berasumsi hal ini akan mengganggu proses reunifikasi antara dua Cina. Asumsi ini semakin kuat dengan menguatnya posisi Lee Teng Hui untuk menjadi orang nomor satu di Taiwan. Sedangkan figur Lee Teng Hui

diketahui sebagai orang yang anti terhadap pemerintah Beijing walaupun dari garis moderat. Dengan materi kampanye yang berisi hujatan terhadap rezim komunis dan masa depan Taiwan yang lebih cerah dan mandiri, hal ini ternyata membawa kekhawatiran bagi pihak Cina daratan.

Sikap tegas yang diambil pihak Beijing adalah menggelar latihan militer dalam skala besar yang melibatkan kekuatan darat, laut dan udara. Acara ini dilakukan di selat Taiwan dan berlangsung mulai tanggal 12-20 Maret 1996. Selain itu dilakukan pula uji coba penembakan rudal jarak menengah M -19 ke kawasan lepas pantai utara dan selatan Pulau Formosa (Taiwan). Latihan berskala besar ini ternyata meliputi wilayah yang cukup luas hingga kawasan Laut Cina Selatan, tepatnya antara Shontou (RRC) dan Kachsiung (Taiwan).<sup>1</sup>

Tindakan keras yang berupa ancaman militer tersebut dilakukan oleh pihak RRC untuk memberi *warning* bagi pihak Taiwan sekaligus untuk mempengaruhi proses pemilu itu sendiri. Peringatan pihak Beijing ini difokuskan padaantisipasi keinginan merdeka dari pihak Taiwan.

Sebenarnya konflik dua Cina ini merupakan cerita lama yang tak kunjung usai. Diawali dengan meletusnya perang saudara pada tahun 1946-1949. Perang ini terjadi antara Partai Koomintang dan Partai Komunis Cina (PKC) dan berakhir dengan diploklamirkannya Republik Rakyat Cina (RRC) 1 Oktober 1949. Sebagai pihak yang kalah dalam peperangan itu, Partai koomintang menyingkir ke Pulau Formosa yang saat ini lebih dikenal sebagai Taiwan sejak 18 Desember 1949.

---

<sup>1</sup> *Republika* 10 Maret 1996

Namun pertikaian antara Cina Komunis dan Cina Nasionalis sejauh ini tidak kunjung reda. Disatu pihak RRC mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian dari daratan Cina, sementara itu penguasa Taiwan beranggapan bahwa pada saatnya nanti daratan Cina akan dapat direbut kembali.

Bila merefleksi dari fakta tersebut bisa disimpulkan bahwa masalah dua Cina atau masalah Taiwan (Taiwan Issue) merupakan masalah dalam negeri Cina yang mempunyai aspek Internasional. Yang menjadi esensi dari masalah tersebut adalah bagaimana seharusnya hubungan kekuasaan politik dan masyarakat sipil antara Republik Rakyat Cina dan Republik Cina di Taiwan serta bagaimana seharusnya hubungan tersebut dilaksanakan.<sup>2</sup>

Beberapa pemikiran tentang solusi masalah dua Cina yang berkembang dewasa ini sangat bervariasi, mulai dari usul agar Taiwan melakukan unifikasi dengan induknya (RRC), saran lainnya adalah agar Taiwan terlepas dari induknya dan menyatakan sebagai negara yang merdeka, kemudian ada argumen yang merupakan bentuk akomodasi dari dua pendapat di atas. Namun demikian pemikiran-pemikiran yang berkembang tersebut tidak ada satupun yang menyepakati tindakan militer sebagai alternatif walaupun kemungkinan hal itu terjadi relati besar.

Taiwan dengan luas 35.203 Km<sup>2</sup> dan dengan populasi 21.091.663 jiwa (1993) Pendapatan Nasional Bruto \$ 209 Milyar (1992). Sedangkan Cina dengan luas 9,7 juta Km<sup>2</sup> dan populasi 1,2 Milyar dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 9% per tahun. Ternyata keduanya memiliki keterkaitan historis yang cukup erat. Sebab pada

---

<sup>2</sup> Thomas B. Gold, *The Status Quo is not Static: Mainland-Taiwan Relations*, dalam Asian Survey Vol XXVIII no. 3, Maret 1987, Hal. 300.

masa lalu Taiwan merupakan bagian dari wilayah kekuasaan imperium Cina Daratan.<sup>3</sup>

Hal ini bisa dilihat dari kronologis historis sebagai berikut :

- Tahun 1885 : Imperium Cina memproklamkan Taiwan sebagai salah satu propinsinya.
- Tahun 1895 : Taiwan diserahkan oleh Cina kepada Jepang yang kemudian memerintah pulau tersebut selama setengah abad.
- Tahun 1945 : Kekuasaan kolonial Jepang berakhir dan pemerintah Nasionalis memerintah Taiwan selama empat tahun dari tanah induk.
- Tahun 1949 : Pemerintah Nasionalis memindahkan pusat pemerintahannya ke Taipe dan menjadikan Taiwan terpisah secara de facto dari tanah induknya.

Dari kronologis sejarah di atas dapat dikatakan bahwa hubungan antara Cina Daratan dengan Taiwan merupakan pola hubungan historis yang sudah mapan, yaitu perimbangan tradisional antara kekuasaan pusat dengan daerah otonom.<sup>4</sup>

Penanganan Pemerintah RRC terhadap masalah Taiwan ini, sangat serius dan terkesan sangat hati-hati. Hal ini pernah diungkapkan oleh orang terkuat di Cina, Deng Xioping, yang mengatakan pada awal pemerintahannya bahwa pemerintah Cina saat ini mempunyai dua tujuan penting, yaitu *modernisasi* dan *penyatuan kembali (reunite) daerah yang hilang (Taiwan, Hongkong dan Macao)*<sup>5</sup>. Persoalan Taiwan yang memiliki dimensi berbeda dengan Hongkong dan Macao ternyata menjadi *crusial point* yang cukup menjadi kendala bagi proses normalisasi hubungan RRC-Amerika

<sup>3</sup> Yung Hwan Jo, *Taiwan's Future*, Center for Asia Studies, Arizona University, 1977, hal. 100.

<sup>4</sup> Ibid., hal. 5

<sup>5</sup> Ketiga daerah tersebut sering disebut *The Last National Territory* bagi pihak RRC. Selain Taiwan, keberadaan dua daerah tersebut sudah dapat dipastikan akan bergabung lagi dengan RRC. Hongkong akan dikembalikan oleh pihak Inggris pada tahun 1997, sedangkan Macao akan diserahkan oleh Portugal pada tahun 1999.

Serikat terjadi. Dan wajar bila Deng menekankan dengan cukup serius terutama dalam kebijakan proses penyatuan Taiwan<sup>6</sup>

Pendapat itu didukung oleh pemimpin militer Cina yang beranggapan bahwa pembebasan Taiwan dan penyatuan kembali dengan daratan Cina adalah mutlak perlu, karena berkaitan dengan keamanan RRC untuk memperoleh kembali wilayah nasionalnya khususnya Taiwan. Sesuai dengan isu *Territorial Claim* atau *Doctrine Irredentism*<sup>7</sup> yang merupakan dasar pokok kebijaksanaan RRC terhadap Taiwan.

Berkenaan dengan upaya reunifikasi Taiwan, pemerintah Beijing mulai melakukan terobosan politik dengan suatu kebijaksanaan yang lebih lunak terhadap Taiwan. Rezim Komunis tersebut mulai menawarkan penyatuan secara damai dengan suatu model *One Country Two System* (satu negara dua sistem) atau khusus untuk Taiwan adalah *One Country Two Government*. Selain itu pemerintah Beijing juga menawarkan suatu wilayah khusus bagi Taiwan yang disebut *Special Administration Region* (SAR), yaitu kebebasan untuk meneruskan sistem yang ada sekarang ini meliputi ekonomi, politik dan militer.<sup>8</sup>

Konsep *One Country Two System* ini sebenarnya merupakan konsep yang diadopsi dari keberhasilan pemerintah RRC dalam mengembalikan Hongkong dari Pemerintah Inggris yang diratifikasi oleh Perdana Menteri RRC Zao Ziang dengan PM

<sup>6</sup> *Far Eastern Economic Review*, 16 maret 1979, hal. 46.

<sup>7</sup> *Doctrine Irredentism* menyatakan sebuah negara berdaulat berhak untuk mengadakan claim atas wilayah diluar kedaulatannya yang didasari aspek keterkaitan historis dan budaya. (James Mayall, 1990.57)

<sup>8</sup> R. Siti Zuhro, *Politik Reunifikasi Beijing Terhadap Taipei*, dalam *Jurnal Ilmu Politik* 4, AIPI dan LIPI, PT. Gramedia, 1989, hal. 78



Inggris Margareth Thatcher tanggal 18 September 1984. Keberhasilan ini memicu semangat pemerintah Beijing untuk berupaya keras melakukan reunifikasi nasionalnya.

Proses reunifikasi secara damai sangat diinginkan oleh pemerintah RRC, maka segala sesuatu yang dianggap akan menggagalkan upaya tersebut akan ditentang habis-habisan. Sikap tegas dengan show of force perlu diperlihatkan pemerintah RRC dalam menyikapi fenomena Pemilu Presiden pertama di Taiwan yang juga merupakan yang pertama di wilayah Cina selama  $\pm$  5000 tahun. Tindakan keras dan reaksioner ini diambil karena pemerintah Beijing melihat tanda-tanda bahwa Pemilu ini diadakan tidak hanya untuk memilih presiden tapi juga digunakan sebagai momentum untuk menyatakan kemerdekaan Taiwan.

Peristiwa pemilu ini sebenarnya merupakan buah keberhasilan dari adanya proses demokratisasi di Taiwan. Diawali dengan adanya kebijakan reformasi sistem politik pada tahun 1986, pemerintah Taiwan mengeluarkan kebijakan melegalkan atau memperbolehkan pembentukan partai oposisi resmi setelah sekian lama hanya ada sebuah partai yaitu Koumintang. Dan selanjutnya berdirilah partai oposisi *Democratic Progressive Party (DPP)* atau *Minchintang*. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Chiang Ching-kuo pada 15 Juni 1987 adalah mencabut UU Darurat yang telah berlaku selama empat dasawarsa. Dengan demikian Taiwan kembali pada posisi normal. Pada tahun 1989, Taiwan mengadakan pemilu tingkat nasional dan propinsi untuk memperebutkan kursi di majelis rendah.

Melihat gejala proses demokratisasi tersebut pihak Cina tentunya sangat khawatir bila kemudian demokratisasi ini akan menyuburkan benih-benih keinginan untuk merdeka. Dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa keinginan masyarakat

Taiwan untuk merdeka mulai meningkat, terutama dikalangan muda yang tentunya tidak terikat secara historis pada akar konflik Dua Cina.

Keinginan merdeka ini tentunya sangat bertentangan dengan kebijakan pokok pemerintah Cina terhadap masalah Taiwan, yang tertuang dalam Delapan Sikap RRC Soal Taiwan -- merupakan Pidato Presiden RRC Jiang Zemin yang juga sebagai Sekjend PKC pada tanggal 30 Januari 1995-- yang isinya, yaitu :

1. Prinsip "Satu Cina" menjadi dasar reunifikasi damai.
2. Cina tidak keberatan Taiwan mengadakan hubungan ekonomi, budaya dengan negara lain, tetapi bukan berarti melakukan promosi "Satu Cina, Satu Taiwan", yang bertujuan mencari pengakuan kemerdekaan Taiwan dari Cina.
3. Negosiasi mengenai reunifikasi damai harus bertujuan mengakhiri permusuhan kedua belah pihak.
4. Sesama Cina tidak akan bertikai. Cina hanya menggunakan kekuatan militer pada pihak asing yang turut campur dalam hal mendukung kemerdekaan Taiwan.
5. Usaha utama adalah peningkatan hubungan dan kerjasama ekonomi kedua Cina.
6. Reunifikasi damai dibentuk berdasarkan kebudayaan Cina yang berumur berabad-abad.
7. Cina akan menghormati aspirasi dan gaya hidup warga Taiwan dan melindungi hukum dan kepentingan Taiwan.
8. Cina akan menyambut para pemimpin Taiwan yang datang ke Cina atas nama pribadi dengan tangan terbuka, dan sebaliknya Cina mengharapkan undangan pemerintah Taiwan.<sup>9</sup>

Menurut pemerintah Beijing, peristiwa pemilu ini sudah merupakan tamparan keras. Apalagi bila Taiwan benar-benar menyatakan kemerdekaannya. Asumsi Taiwan ingin merdeka semakin kuat dengan manuver yang dilakukan oleh Lee Teng Hui

<sup>9</sup> Kompas Selasa, 8 Januari 1996, hal. 6. Juga dapat dilihat pada *China, the US and Taiwan of Copyrights and Human Right*, dalam *Taiwan Comunique*, no. 65, April 1995. Pidato Presiden

(Presiden Taiwan saat itu) ---kandidat presiden yang diunggulkan--- mengunjungi AS sebelum pemilu, serta kebijakan *Selatan-nya*<sup>10</sup>. Selain itu, pernyataan diawal kampanye yang secara implisit menginginkan Taiwan merdeka. Terlebih lagi ia terkenal sebagai tokoh anti-Cina walaupun dari garis moderat.

Mencermati fenomena pemilu Taiwan ini dan lebih jauh lagi tentang sikap serta kebijakan apa yang sebenarnya di ambil oleh pihak Beijing dan khususnya dampak pemilu tersebut terhadap proses reunifikasi sangat menarik. Hal ini didukung oleh kondisi kedua Cina terutama Taiwan yang saat ini telah menjadi *New Industrial Country (NIC)*, dan disorot oleh dunia internasional terutama pada perumbuhan ekonomi. Dan keduanya diramalkan akan menentukan perekonomian kawasan Asia saat liberalisasi dilakukan.

Bertolak pada alasan-alasan di atas, maka penulis berketetapan hati untuk memilih judul skripsi adalah :

**"Kebijakan Pemerintah RRC Terhadap Pemilu Taiwan Tahun 1996  
dan Dampaknya bagi Proses Reunifikasi".**

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Pemberian batasan pada suatu penulisan ilmiah mempunyai arti yang sangat penting, karena kecenderungan pembahasan yang tidak seksama serta kemungkinan

---

Jiang Zemin ini berjudul " *Continue to promote the reunification of the Motherland*". Lebih jauh dapat lihat di lampiran.

<sup>10</sup> Kebijakan yang lebih mendekatkan diri kekawasan Asia terutama Asia Tenggara dengan lebih terbuka dan mandiri.

terjadinya pembiasaan masalah sedikit banyak dapat teratasi. Selain itu, juga dapat mempertajam fokus pembahasan sehingga akan meningkatkan bobot ilmiah suatu penulisan.

Makna ruang lingkup ini adalah untuk memberi arah kepada pembahasan agar sesuai dengan masalah yang dimaksud, serta untuk memudahkan penulis dalam mengatasi kesulitan pencarian data dan dalam menganalisa data dalam kurun waktu tertentu. Sebagaimana yang dikatakan oleh *Sutrisno Hadi* :

**“Sekali suatu persoalan telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan tersebut. Bagi penyelidik sendiri penegasan batas-batas ini akan menjadi pedoman kerja, dan bagi orang lain kepada siapa laporan itu hendak disajikan atau diserahkan. Penegasan selalu berfungsi mencegah kemungkinan timbulnya kerancuan pengertian dan kekaburan wilayah persoalannya.”<sup>11</sup>**

Selain itu pendapat *Kartini Kartono* bisa diambil sebagai pendukung untuk lebih menjelaskan pembatasan masalah, yaitu :

**“Pembatasan masalah sangat berkaitan dengan adanya limit perangkasan, sempitnya waktu, terbatasnya tenaga dan kemampuan intelektual guna menyelidiki semua interaksi persoalan.”<sup>12</sup>**

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap penulisan harus ada arah pembahasan dan tidak mengalami pelebaran masalah, maka penulis memilahkan ruang lingkup batasan ini menjadi dua aspek, yaitu aspek obyektif materi dan aspek waktu.

<sup>11</sup> *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1994, hal. 8

<sup>12</sup> *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1996, hal. 55

### 1.2.1 Aspek Materi

Batasan aspek materi sesuai dengan judul di atas, penulis membatasi materi pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sikap dan kebijakan RRC terhadap Taiwan selama ini terutama lebih terfokus lagi pada fenomena pemilu Taiwan pada tanggal 23 Maret 1996. Dalam pembatasan ini juga diupayakan untuk mengungkap proses-proses reunifikasi yang telah dilakukan keduanya dan juga kendala-kendala apa saja yang mereka alami selama ini. Selain itu juga diharapkan dapat mengurai pola hubungan -- baik berupa konflik ataupun kerjasama-- yang selama ini terjadi dan tentunya kaitan historis yang pernah terjalin antara keduanya.

Bagaimanapun pemilu Taiwan ini lebih jauh sebagai suatu peristiwa yang cukup menarik untuk dikaji. Sebab dalam pemilu menyimpan banyak hal yang bisa dan perlu diteliti dan dijelaskan. Pemilu bagi Taiwan merupakan simbol sebagai negara (subyektif Taiwan)<sup>13</sup> yang menjunjung tinggi demokrasi. Selain itu, pemilu juga menguji sampai sejauh mana keinginan rakyat Taiwan untuk merdeka dan juga penting bagaimanakah anggapan dunia internasional terutama RRC terhadap peristiwa politik tersebut.

Selain itu dalam batasan materi ini juga akan dibahas determinan apa saja yang berpengaruh terhadap pola hubungan antara dua Cina tersebut. Sehingga diharapkan akan ada suatu pembahasan yang komprehensif sesuai dengan tujuan ideal suatu penelitian.

---

<sup>13</sup> Berdirinya suatu negara setidaknya harus memiliki *wilayah, penduduk, pemerintah yang berdaulat* dan *adanya pengakuan internasional*. Lebih jauh, salah satu syarat pemerintah yang berdaulat adalah *diadakannya pemilu* untuk memilih Legislatif yang kemudian akan membentuk eksekutif.



### 1.2.2 Aspek Waktu

Pembatasan waktu diambil dengan maksud bahwa di dalam setiap penulisan ilmiah terdapat masa berlakunya aspek materi yang dibahas yaitu sejak kapan fokus perhatian pada penulisan aspek materi tersebut dimulai diletakkan dan sampai pula akhir aspek materi itu.

Dari pengertian tersebut dalam penulis skripsi ini merasa perlu meletakkan batas dimensi waktu dari aspek pembatasan materi yaitu pada periode waktu sejak tahun 1979 hingga tahun 1996. Patokan waktu ini diberlakukan dengan alasan pada tahun 1979 RRC mulai membuka hubungan diplomatik dengan AS yang membawa implikasi pula terhadap pendekatan dan pola hubungan dengan Taiwan. Dari rentang waktu tersebut banyak perubahan yang terjadi baik pada RRC dan Taiwan. Ketegangan maupun pembicaraan kearah proses reunifikasi silih berganti terjadi. Sedangkan titik tahun 1996 merupakan titik tahun yang menurut penulis sangat representatif untuk mengakhiri proses pengumpulan data guna menjawab fenomena yang terjadi terhadap pokok bahasan penulisan ini.

### 1.3 Problematika

Menentukan atau merumuskan suatu masalah adalah sangat penting yang harus dilakukan dalam menganalisa suatu hal. Perumusan problematika yang jelas dapat mempermudah diketemukannya suatu jawaban sesuai dengan yang dimaksud.

Menurut *Moh. Hatta* masalah adalah :

**“Kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas dengan melihatnya saja, melainkan kita ingin mengetahuinya lebih dalam. Masalah berhubungan dengan ilmu. Ilmu senantiasa menemukan pertanyaan bagaimana (duduknya persoalan itu) dan apa sebabnya”.**<sup>14</sup>

Sedangkan menurut *Winarno Surachmad*, permasalahan adalah :

**“Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan suatu rintangan yang harus dilalui (dengan jalan mengatasinya) apabila kita ingin berjalan terus”.**<sup>15</sup>

Dengan mengacu pada pendapat di atas penulis merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa pemilu Taiwan. Karena peristiwa ini tidak berjalan begitu saja tanpa dasar pemikiran tertentu. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh yang ditimbulkan oleh pemilu Presiden tersebut yang membuat efek cukup besar bagi hubungan dua Cina.

Bagi pihak RRC pemilu tidak dapat dianggap main-main, oleh sebab itu suatu sikap yang jelas dan tegas sangat diperlukan. Sikap yang diambil harus memperhitungkan aspek ekstern (global) terutama pada peran AS yang saat ini menjadi polisi tunggal dunia. Yang pasti RRC tidak mau dijebak dalam “drama satu babak” yang telah diskenariokan oleh pihak Taiwan. Dan perlu diingat bahwa ketegangan di wilayah ini akan berpengaruh besar pada stabilitas keamanan dan politik kawasan Asia Pasifik. Hal ini pasti tidak dikehendaki oleh AS.

<sup>14</sup> Moh. Hatta, *Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1954.

<sup>15</sup> Winarno Surachmad, *Dasar-Dasar Teknik Research*, CV. Tarsito, Bandung, 1975, hal. 33

Berpijak dari kenyataan ini, penulis meletakkan problematika skripsi ini sebagai berikut :

**“Bagaimana Kebijakan RRC Terhadap Pemilu Taiwan Tahun 1996**

**Dan Seberapa jauh Dampak Pemilu Tersebut Bagi Proses Reunifikasi”.**

#### 1.4 Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan pedoman untuk bertindak dalam menguji data dan menganalisis permasalahan yang ada. Dalam memecahkan permasalahan penggunaan teori yang komprehensif sangat dibutuhkan, karena teori sebagai landasan analisa dan juga pemikiran diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tepat.

Jack C. Plano memberikan pengertian teori secara umum sebagai berikut :

**“Suatu gagasan atau kerangka berpikir yang mengandung penjelasan, ramalan atau anjuran pada setiap bidang penelitian. Dalam ilmu pengetahuan yang empiris, (termasuk Ilmu Politik) teori mengacu pada kaitan logis pada perangkat proposisi yang memastikan adanya hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan atau meramalkan atau kedua-duanya.”<sup>16</sup>**

---

<sup>16</sup> Jack C. Plano, dkk, *Kamus Analisa Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 226



Sedangkan lebih spesifik, Mc Cain dan Segel dalam bukunya *Mohtar Mas'ood* mendefinisikan teori sebagai berikut :

**“Seperangkat statement yang saling berkaitan yang terdiri dari :**

**1. Kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk konsep-konsep dasar teori; 2. Kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain; 3. Kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statement itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empiris (hipotesa).”<sup>17</sup>**

Bertitik tolak dari pendapat tersebut maka teori mempunyai beberapa fungsi, sebagaimana menurut Snelbecker, teori memiliki fungsi sebagai mensistemkan penemuan-penemuan peneliti menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis, membimbing peneliti menemukan jawaban, membuat ramalan atas dasar penemuan-penemuan dan menyajikan penjelasan guna menjawab pertanyaan.

Untuk keperluan itu, penulis menggunakan *teori konflik* sebagai pisau analisa pembahasan skripsi ini. Teori konflik didefinisikan menurut *Jack C. Plano*, adalah :

**“Suatu jenis interaksi yang ditandai dengan bentrokan atau tubrukan di antara kepentingan, gagasan, kebijakan program dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang satu sama lainnya saling bertentangan.”<sup>18</sup>**

Konflik merupakan bagian dari gejala interaksi sosial yang melingkupi kehidupan manusia sehari-hari. Konflik akan muncul bila kerjasama dan kompetisi sudah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

<sup>17</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 219.

<sup>18</sup> Jack C. Plano, dkk., *Op cit.*, hal. 266.

Pengertian konflik adalah "benturan" seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, antara individu atau kelompok dengan negara atau pemerintah bahkan pada tataran lebih tinggi, antara negara atau pemerintahan dengan negara atau pemerintah lainnya.

Biasanya dalam konflik masing-masing pihak berupaya keras untuk mendapatkan atau mempertahankan sumber yang sama. Namun, upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber tersebut ternyata kekerasan bukan satu-satunya pilihan yang dapat digunakan. Pada umumnya penggunaan kekerasan cenderung digunakan sebagai alternatif terakhir. Pada tataran penggunaan kekerasan sebagai alternatif, konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik yang tidak berwujud kekerasan dan konflik yang berwujud kekerasan.

*Pertama*, konflik yang tidak berwujud kekerasan pada umumnya dapat ditemui dalam masyarakat-negara yang memiliki konsensus dasar dan tujuan negara serta mekanisme pengaturan penyelesaian konflik yang telah melembaga. Bentuk-bentuk konflik ini antara lain : unjuk rasa (demonstrasi), pemogokan, pembangkangan sipil, pengajuan petisi, protes, dialog (musyawarah) dan polemik melalui surat kabar.<sup>19</sup>

*Kedua*, konflik yang mengerah pada kekerasan yang terorganisir muncul sebagai akibat dari posisi yang kontradiktif, sikap permusuhan dan tindakan militer atau diplomatik dari beberapa kelompok tertentu atas suatu masalah, yang masih

---

<sup>19</sup> Ralf Dahrendorf, *Conflict Groups, Group of Conflict and Social Change*, disunting oleh Rimelan Subekti, PT. Gramedia, Jakarta, 1992, hal. 149-150.

memiliki tujuan tertentu pula. Perbedaan tujuan dan pendirian antar kelompok serta posisi yang hendak dicapai merupakan penyebab utama dari konflik ini.<sup>20</sup>

Menurut *K.J. Holsti*, fenomena konflik bentuk kedua ini akan terjadi bila tingkah laku konflik (dalam bentuk sikap ataupun tindakan) dari kelompok A yang menempati posisi bertentangan dengan kemauan dan kepentingan kelompok B atau kelompok lainnya.<sup>21</sup>

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa konflik yang terjadi pada dua Cina merupakan konflik intern. Hal ini bisa dilihat dari akar permasalahannya atau dari sudut historis kedua wilayah tersebut yang memang merupakan satu kesatuan wilayah.

Keputusan pemerintah Taiwan melakukan pemilu bukan tanpa perhitungan yang matang. Pemilu ini merupakan perilaku *bargaining position* (tawar-menawar) pihak Taiwan dalam konfliknya dengan pemerintah Cina. Sebab dengan adanya pemilu maka jelas sekali akan menunjukkan pada dunia internasional bahwa Taiwan merupakan penganut atau pendukung pemerintahan yang pro-demokrasi. Karena pemilu merupakan salah satu indikator bagi pemerintahan yang menganut faham demokrasi.

Sedangkan tindakan RRC sendiri menghadapi pemilu ini jelas akan keras apabila dalam pemilu tersebut Taiwan secara terang-terangan akan memerdekakan diri. Pengiriman pasukan dalam skala besarpun dilakukan sebagai upaya peringatan dan *show of force* bagi Taiwan. Tindakan ini akan meningkat pada penggunaan kekerasan militer bila Taiwan benar-benar ingin merdeka.

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> *K.J. Holsti, Politik Internasional, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987, hal. 592.*

Dalam hal ini kedua belah pihak ternyata telah memperhitungkan langkahnya secara matang. Kenyataan ini sesuai dengan prinsip bila ada aksi maka akan menimbulkan suatu reaksi yang melawan aksi tersebut, relevan dengan Postulat Newton.

Menurut *Thomas Schelling*, dalam bukunya yang bertitel *The Strategy of Conflict*, konflik dipandang sebagai wujud perilaku bargaining position. Ia memandang konflik sebagai suatu permainan (game) strategi.. Arah dan tindakan yang paling baik bagi setiap pemain tergantung pada perkiraan-perkiraan tentang apa yang (akan) dilakukan oleh lawannya. Hal ini didasarkan pada asumsi para pemain berperilaku rasional dengan memperhitungkan hasil dengan seksama antara untung dan rugi menurut sistem nilai yang dianut dalam mencapai tujuan tersebut. dan perlu dicatat bahwa para pemain berposisi berhadapan dan mempunyai kepentingan yang bertentangan walaupun hanya sebagian saja.

Kunci keberhasilan untuk memenangkan permainan terletak bukan hanya dalam menerapkan sejumlah kekuatan yang tepat untuk memaksa lawan mengalah, tetapi juga dalam menjaga kredibilitas paksaan itu. Kalau setiap pemain yang berlawanan itu mendasarkan pilihan tindakannya pada perkiraannya tentang apa yang dilakukan lawan, pemain yang berusaha menaklukkan lawan dengan menggunakan pengaruhnya harus meyakinkan lawan bahwa ia akan betul-betul melaksanakan ancaman atau yang dijanjikan, kredibilitas ancaman atau janji ini sangat menentukan hasil permainan.<sup>22</sup>

Dalam peristiwa ini, tampak kedua belah pihak sama-sama melakukan ancaman dengan menggunakan kemampuan potensial yang dimiliki. Di pihak Cina

Nasionalis melakukan “aksi” ancaman akan memerdekakan diri. Sedangkan pihak Cina Komunis melakukan “reaksi” ancaman akan menggunakan kekerasan atau kekuatan militer bila pihak Taiwan benar-benar merdeka.

Tetapi ketika aksi itu mulai mengendor, maka reaksi pun ikut surut dengan sendirinya. Hal ini tampak jelas ketika pihak Taiwan tidak jadi melaksanakan keinginan merdeka maka pihak RRC mulai menarik ancaman untuk menyerang.

### 1.5 Hipotesa

Suatu keharusan yang perlu dipegang dalam penulisan karya ilmiah adalah adanya suatu hipotesa yang merupakan dugaan tentang jawaban sementara dari permasalahan yang ada. Hipotesa diperlukan untuk menemukan suatu alternatif yang terdekat di antara berbagai macam dugaan yang mendekati kebenaran. Dengan demikian suatu hipotesa masih memerlukan pembahasan lagi, *Komarudin* dalam bukunya mengatakan bahwa :

**“Suatu hipotesa adalah kesimpulan atau perkiraan yang tajam, yang dirumuskan dan untuk sementara dapat diterima untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan atau peristiwa atau kondisi-kondisi yang diperhatikan untuk menyelidiki lebih lanjut”.<sup>23</sup>**

Dalam hubungannya dengan permasalahan atau problematika yang penulis ajukan untuk mengkaji fenomena pemilu Taiwan tersebut, maka hipotesa yang penulis ambil adalah sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Mohtar Mas'ood, Op cit., hal. 223 - 224

<sup>23</sup> Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1975, hal. 80.

1. Pemilu merupakan upaya menaikkan bargaining position bagi Taiwan dalam penyelesaian konflik dengan Cina. Sedangkan kebijakan RRC terhadap pemilu Taiwan tetap membiarkan pemilu berlangsung karena tidak ada pernyataan merdeka dari pihak Taiwan
2. Dampak pemilu terhadap proses reunifikasi atau perdamaian dua Cina tampaknya tidak terlalu besar.

### 1.6 Metode Penelitian

Suatu penelitian selalu mempunyai tujuan pokok, yaitu ingin menjelaskan fenomena. Dalam memahami fenomena tersebut, peneliti harus menghubungkan fenomena yang satu dengan yang lainnya melalui metode tertentu. Proses ini sangat memerlukan dukungan data yang cukup akurat untuk dianalisa. Sesuai dengan pendapat *Soetrisno Hadi* :

**“Usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode penelitian”.**<sup>24</sup>

Secara umum metode menurut *Winarno Surachmad* adalah :

**“Merupakan cara utama yang digunakan untuk mencari suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini dipergunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan penelitian serta dari situasi penelitian”.**<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980, hal. .

<sup>25</sup> Winarno Soerachmad, *Op cit.*, hal. 121

Selanjutnya penulis dalam proses penelitian ini membagi metode penelitian menjadi beberapa bagian yang mencakup :

### 1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang penulis pilih dalam proses pengumpulan data ini adalah metode observasi melalui riset kepustakaan. Dalam hal ini yang dilakukan dengan melengkapinya literatur yang sesuai dengan tujuan dari penulisan skripsi ini. Untuk memperoleh data yang memadai, penulis mendatangi beberapa perpustakaan antara lain :

1. Perpustakaan Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
2. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta.
3. Pusat Informasi Kompas, Jakarta.
4. Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
5. Perpustakaan Universitas Jember.

### 1.6.2 Metode Analisa

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka selanjutnya adalah proses analisa data. Dari proses analisa data inilah kesimpulan dapat ditarik.

Analisa menurut *The Liang Gie* adalah :

**“Sege nap rangkaian perbuatan pikiran yang menelaah suatu hal secara mendalam, terutama mempelajari bagian-bagian suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri dari masing-masing bagian,**

hubungan satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat itu".<sup>26</sup>

Agar memperoleh hasil penelitian dan analisa yang komprehensif, penulis menggunakan cara berpikir *reflektif* yaitu dengan mengkombinasikan metode berpikir *induktif* dan *deduktif*.

Menurut *Marzuki*, metode berpikir *reflektif* adalah :

"Mulai dengan induktif untuk menunjukkan persoalan atau menetapkan hipotesa kemudian diikuti dengan deduktif guna meletakkan kerangka atau jalan untuk pembuktian hipotesa yang dibuat. Selanjutnya hipotesa perlu diuji kebenarannya dengan induksi sehingga memperoleh pemecahan yang konklusif".<sup>27</sup>

Menurut *Sutrisno Hadi*, berpikir *deduktif* adalah :

"Apa yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam kelas atau jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa dalam kelas atau jenis".<sup>28</sup>

Cara berpikir *induktif* adalah :

"Berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum".<sup>29</sup>

Dengan kombinasi kedua metode tersebut akan diperoleh kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

<sup>26</sup> The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta, 1986, hal. 106.

<sup>27</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, BPFE UII, Yogyakarta, 1982, hal 21.

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Op cit*, hal. 36.

<sup>29</sup> *Ibid*.



### 1.7 Pendekatan

Dalam upaya mempertajam analisa diperlukan suatu pendekatan atau approach yang membuat penelitian menjadi spesifik. Menurut *Vernon Van Dyke*, suatu pendekatan (approach) adalah :

**“Kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang merelevan dengan data yang lain, pendekatan mencakup standart atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah menentukan data mana yang akan diteliti serta data mana yang dikesampingkan”.**<sup>30</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan Political History Approach yang menurut *Eisemann* adalah *political history is, in the last resort, the cronological description of political fact of every kind whether institutional or non-institutional, in the life of a state (on a political society) considered sparetly (internal policy) or the relations between several state (or societies).*

Dengan menggunakan pendekatan sejarah bertujuan untuk dapat mengeksplanasi dan menganalisa serta mencari setting sejarah timbulnya konflik dua Cina dan lebih khusus lagi, tentang pemilu di Taiwan.

Penulis juga menggunakan pendekatan lain bila hal itu dirasa perlu guna mendukung akurasi analisa yang akan dilakukan. Dan diharapkan akan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang tepat menjawab atau paling tidak mendekati permasalahan serta mendukung hipotesa yang ada.

---

<sup>30</sup> Miriam Budharjo, *Pendekatan-Pendekatan Dalam Ilmu Politik*, dalam Jurnal Ilmu Politik I, PT. Gramedia, Jakarta.

## BAB II

### DUA CINA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

#### 2.1 Keterkaitan Taiwan Dalam Hlstoris Cina.

Istilah Cina (Chung Kou) ternyata telah digunakan sebelum periode maschi, walaupun penggunaan istilah tersebut hanya terbatas pada wilayah-wilayah di lembah sungai Kuning. Selanjutnya istilah ini lebih dikenal untuk mewakili wilayah Cina daratan.

Sedangkan istilah Taiwan digunakan untuk mewakili sebuah pulau yang dulunya disebut pulau Formosa. Formosa sendiri adalah pemberian nama oleh Portugis. Kepulauan ini berada di sebelah utara laut Cina Selatan sedangkan sisi selatan berhadapan dengan Philipina. Sebelah timur behadapan dengan Samudra Pasifik, sedangkan sisi barat -tepatnya barat daya- berbatasan dengan Cina daratan . Secara astronomi, terletak pada  $23,5^{\circ}$  LU -  $27,5^{\circ}$  LU dan  $123^{\circ}$  BT -  $127^{\circ}$  BT. Dengan demikian wilayah ini termasuk kawasan beriklim sub tropis. Dengan luas wilayah  $32.203 \text{ Km}^2$ .

Taiwan sebenarnya tidak termasuk dalam wilayah imperium rezim Cina daratan sampai akhir abad XVII, hal ini juga dialami oleh Mongolia. Penduduk Taiwan juga bukan merupakan orang-orang Cina daratan, namun dalam perkembangannya wilayah tersebut tidak dapat menolak arus imigrasi penduduk dari wilayah lain. Arus imigrasi penduduk dari Cina daratan dimulai pada abad VII, yang selanjutnya disusul oleh imigrasi dari bangsa lain, terutama bangsa Jepang pada abad-abad berikutnya.

Bangsa Portugis merupakan bangsa barat pertama yang datang ke Taiwan pada abad XVI dan menamai pulau tersebut dengan *Formosa* yang berarti 'beautiful'. Selanjutnya tahun 1641 pulau tersebut dikuasai oleh bangsa Belanda sampai tahun 1662, ditandai dengan kekalahan Belanda dari dinasti Ming. Tetapi hal ini tidak lama, karena dinasti Ming kemudian dikalahkan oleh bangsa Manchu yang mengawali pemerintahan dinasti Manchu diseluruh kawasan Cina.

Hal ini lebih jauh *Encyclopedic Almanac* pada *New York Time* menjelaskan sebagai berikut :

*"Chinese emigration to Taiwan began in 7<sup>th</sup> century. In 16<sup>th</sup> century the Portugies arrived and naming the island Formosa, meaning 'beautiful'. The Dutch assumed control in 1641 but were driven out in 1662 by Ming Dynasty forces when they fleeing from mainland because the Manchu take over it. In 1683 Taiwan fell to Manchu's. At the end of the Sino-Japanese war of 1894-1895 it was ceded to Japan, which held it until the conclusion of word war II when it was restored to China."*<sup>1</sup>

Pada tahun 1683 Taiwan sudah berada dibawah pengawasan Pemerintah Cina (dinasti Manchu). Kondisi ini yang memicu arus imigrasi penduduk Cina ke Taiwan. Para imigran Cina tersebut terutama berasal dari Propinsi Fukien dan Kuantung. Secara bertahap penduduk kedua propinsi itu mememuhi Pulau Taiwan dan hidup berdampingan dengan penduduk asli selama beberapa abad kemudian. Pada periode ini Taiwan dianggap sebagai bagian dari Propinsi Fukien yang diperintah secara longgar. Proses asimilasi budaya terjadi secara bertahap yang akhirnya membawa Taiwan ke dalam khasanah kebudayaan Cina pada akhir abad XVIII. Pada tahun 1885, pulau tersebut sudah menjadi salah satu propinsi di Cina dan bukan lagi sebagai bagian dari Propinsi Fukien yang terletak diseberang pulau tersebut.

Walaupun Taiwan merupakan bagian dari negara Cina, namun tak dapat dipungkiri bahwa imbas perkembangan internasional yang semakin kompleks sejak tahun 1885 telah mampu memberi warna pada karakter pulau tersebut sebagai suatu negara yang berdaulat.

Dalam perkembangan selanjutnya penduduk Jepang semakin banyak berdatangan dan menetap di Taiwan. Hal ini ternyata sangat berpengaruh terhadap kebijakan elit Tokyo sehingga wajar sekali bila Jepang menginginkan wilayah ini. Setelah perang Cina-Jepang tahun 1894-1895, Jepang akhirnya keluar sebagai pemenang. Dan mulai tanggal 17 April 1895, Jepang mendapatkan dua pulau, yaitu Taiwan dan Poscadores sebagai bagian dari *Perjanjian Shimonoseki* yang menandai berakhirnya perang tersebut.

Pada saat Jepang mulai menderita kekalahan dalam Perang Dunia II, tanggal 26 Nopember 1943, para pemimpin tiga negara yang terdiri dari Inggris yang diwakili PM Winsten Churchill, Amerika Serikat diwakili oleh Presiden Rosevelt dan Cina oleh Chiang Kai Shek, berkumpul dalam suatu konferensi di Kairo. Dalam Konferensi Kairo tersebut berhasil diputuskan bahwa semua wilayah teritorial yang diambil Jepang dari Cina yaitu Manchuria, Formosa (Taiwan) dan Poscadores harus dikembalikan kepada Cina.<sup>2</sup>

Selanjutnya, pada tanggal 26 Juli 1945 *Perjanjian Postdam* melengkapi dan semakin mempertegas deklarasi Konferensi Kairo, yang menyatakan bahwa hasil-hasil

---

<sup>1</sup> *Encyclopedic Almanac 1970*, New York Time, hal. 877.

<sup>2</sup> Hungdah Chin, *China, The United State and The Question of Taiwan : Documents and Analysis*, Praeger, New York, 1973, hal. 113. Juga dijelaskan dalam Lie Tek Tjeng, *Study wilayah Pada Umumnya dan Asia Timur Pada Khususnya, jilid II*, Alumni Bandung, 1977, hal. 443-444.

yang telah disepakati dalam Konferensi Kairo harus dijalankan. Dan pada tanggal 26 Oktober 1945, Taiwan dinyatakan secara resmi kembali sebagai bagian wilayah dari Cina.<sup>3</sup>

Setelah Jepang mengembalikan Taiwan kepada Cina yang saat itu dipimpin oleh Chiang Kai-shek dengan partai Koomintangnya, suatu revolusi menentang keberadaan hegemoni Kuomintang pecah pada tanggal 28 Februari 1949. Chiang Kai-shek dan sekitar satu juta pengikutnya mengungsi ke Taiwan setelah pasukannya dikalahkan oleh pihak komunis pimpinan Mao Tse-tung pada perang saudara tersebut. Pihak komunis yang berada di Cina daratan kemudian mendirikan pemerintahan yang dikenal sebagai Republik Rakyat Cina (People Republic of China) tanggal 1 Oktober 1949, sedangkan pihak nasionalis mendirikan Pemerintahan Nasionalis Cina (Republic of China) di Taiwan tanggal 1 Desember 1949. Dengan demikian terjadilah dua pemerintahan yang sama-sama mengklaim sebagai wakil sah dari Cina.

## **2.2 Konflik Dua Cina Dalam Tinjauan Historis**

Dalam bagian ini penulis ingin memberikan ringkasan sejarah tentang dua cina. Agar lebih memudahkan maka dibagi dalam 3 (tiga) pokok bahasan, *pertama*, Dari Monarkhi Menuju Republik, *kedua*, Kemenangan Komunis dan Berdirinya Republik Rakyat Cina (People Republic of China), *ketiga*, Menyingkir Ke Taiwan Dan Menjadi Naga Asia.

---

<sup>3</sup> Ibid, hal. 114.

### **2.2.1 Dari Monarki Menuju Republik**

Sebelum terbentuknya sistem republik di Cina, sistem pemerintahannya masih berbentuk monarki atau kerajaan. Sistem ini telah bertahan ratusan abad bahkan jauh sebelum masehi. Hal ini terbukti dengan diakuinya Cina sebagai salah satu pusat situs peradaban sejarah dunia. Salah satu kerajaan tertua dalam sejarah dunia terdapat di Cina, selain Mesir, Persi dan Babilonia. Beberapa dinasti telah menghiasi lembaran sejarah bangsa tersebut. Dinasti yang terakhir adalah dinasti asing yang lebih dikenal sebagai dinasti Ching atau Manchu yang berkuasa sekitar tahun 1683 - 1911.

Terjadinya berbagai krisis politik yang berulang kali di Cina ternyata membuka peluang bagi masuknya ekspansi asing, seperti yang terlihat dalam setiap pemerintahan beberapa dinasti di Cina. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas dan kebencian yang mendalam dalam diri rakyat sehingga menimbulkan rasa antipati terhadap kerajaan baik dari bangsa sendiri maupun bangsa asing.

Rasa ketidakpuasan ini terjadi akibat kebobrokan para elit kerajaan yang identik dengan korupsi, manipulasi, pemerasan dan penyelewengan kekuasaan. Akumulasi dari rasa ketidakpuasan ini semakin lama semakin besar yang mencapai puncaknya dalam gerakan anti Manchu. Pergerakan anti Manchu ini diorganisir oleh seorang aktor intelektual yang bernama **Dr. Sun Yat Sen**. Dengan kemas ideologi nasionalisme melawan bangsa asing, ternyata cukup ampuh untuk mendapatkan dukungan mayoritas rakyat Cina.

Kemenangan kelompok Sun Yat Sen terhadap dinasti Manchu tersebut menandai berlakunya sistem pemerintahan republik pada tahun 1911. Peristiwa ini

merupakan awal sepak terjang Sun Yat Sen dalam pemerintahan, politik dan terutama sejarah Cina.

Keberhasilan revolusi 1911, yang selanjutnya dikenal sebagai revolusi Tiongkok itu ternyata disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Kemerosotan pemerintahan dinasti Manchu yang pernah mencapai puncak keemasan pada abad ke-17 dan ke-18 ini telah menimbulkan rasa tidak puas pada rakyat.
2. Pertambahan penduduk tinggi, terjadi banyak bencana alam dan timbulnya pemberontakan dalam negeri (Taiping dan Boxer).
3. Masuknya pengaruh asing ke Tiongkok dengan paksa. Hal ini memperlihatkan ketidakmampuan dinasti Manchu. Fenomena tersebut tampak pada perang candu (1839-1842) dan perang terhadap Perancis dan selanjutnya Jepang.
4. Adanya gerakan Tiongkok Nasionalis yang anti Manchu dengan keinginan menjatuhkan dinasti dengan pemerintahan kaum pribumi.<sup>4</sup>

Kesuksesan revolusi Cina tahun 1911 dalam menumbangkan rezim Manchu tersebut tak dapat dilepaskan dari besarnya dukungan rakyat. Semuanya ini didorong oleh semangat nasionalisme Partai Koumintang. Dasar-dasar perjuangan Kuomintang sendiri yang sebagian besar merupakan hasil pemikiran dari Dr Sun Yat Sen, merupakan hasil komparasi pemikiran barat dalam pembangunan dengan nilai-nilai tradisi tertentu Cina yang masih dianggap perlu dipertahankan. Hal ini dapat terlihat jelas dalam *ketiga sila kerakyatan* atau *San Min Chu I* yang merupakan dasar perjuangan yang dianut oleh kaum nasionalis Kuomintang. Adapun ketiga sila tersebut meliputi :

1. Sila pertama, nasionalisme (Min-ts'u)
2. Sila kedua, demokrasi (Min-chu'an), yang pada dasarnya demokrasi ala barat

---

<sup>4</sup> Lie Tek Tjeng, Op Cit, hal. 347

3. Sila ketiga, kesejahteraan rakyat (*Min-shung*) yakni suatu bentuk sosialisme yang menciptakan persamaan dalam kepemilikan tanah, pengaturan modal dan menjabarkan pertentangan kelas.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya pergerakan nasionalisme ini oleh Dr Sun Yat Sen semakin diperbaiki dan lebih diorganisir dengan menerapkan prinsip-prinsip organisasi modern, sehingga lebih teratur dan sistematis terutama dalam menjalankan ide-ide Sun Yat Sen.

*"The Kuomintang, a Chinese political party, was formed by federation of old anti Manchu Secret societies, and has become the vehicle for the will of its leader Dr. Sun Yat Sen; constitutionally and legally it is the superior of the superior of the Chinese national government."*<sup>6</sup>

Perjuangan mendirikan Republic of China ini ternyata suatu hal yang berat dan melelahkan bagi Koumintang. Dimulai pada tanggal 10 Oktober 1911 dengan meletusnya pemberontakan pasukan Cina pribumi di Wuchang. Pemberontakan ini ternyata mampu menyulut api revolusi, sehingga dapat dengan cepat meluas ke seluruh Cina. Peristiwa itu dikenal sebagai *Wuchang Day (Double Ten Day)* yang kemudian dijadikan hari nasional Cina.

Keberhasilan perjuangan rakyat Cina ini ditandai dengan diproklamákannya Republik of Cina dengan menunjuk Dr. Sun Yat Sen sebagai *Presiden Pertama*. Wilayah republik ini hanya meliputi sebagian kecil wilayah selatan Cina.

Posisi republik semakin kokoh dengan turun tahtanya Kaisar Hsuan Tung. Tetapi ada sedikit ganjalan tentang surat pengunduran diri Hsuan Tung yang tidak menunjuk Dr. Sun Yat Sen tetapi melimpahkan kekuasaan pada Jendral Yuan Shih Kai untuk membentuk pemerintahan republik di Peking. Selanjutnya Yuan Shih Kai

<sup>5</sup> *Persepsi, Untuk Mengamankan Pancasila*, Tahun I, No 2, Juli-Agustus 1979, hal. 27.



mengadakan kontak dengan kaum revolusioner di selatan (kaum Kuomintang). Demi menjaga persatuan dan mencegah pertumpahan darah maka Dr. Sun Yat Sen mengundurkan diri. Dengan demikian posisi Yuan Shih Kai sebagai presiden Cina semakin kokoh dan terlegitimasi. Sebab lain yang menyebabkan Sun mengalah karena Jendral Yuan Shih Kai merupakan satu-satunya yang memiliki pasukan kuat serta terlatih baik. Dengan kekuatan tersebut Yuan mampu membawa kondisi Cina menjadi agak teratur.

Keberhasilan Yuan dalam menstabilkan Cina, ternyata membawa implikasi terhadap keinginannya untuk mengubah sistem republik menjadi monarki kembali. Keinginan ini mendapat reaksi keras dari para jenderal (warlords) maupun kaum revolusioner di selatan. Tetapi sebelum cita-citanya menjadi kaisar tersebut terlaksana, Yuan meninggal dunia pada tahun 1916.

Semenjak meninggalnya Yuan Shih Kai, keadaan Cina kembali kacau. Para jendral bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat tanpa menghiraukan pemerintah pusat. Tindakan itu, disebabkan mereka memiliki pasukan dan wilayah kekuasaan sendiri. Bentuk penindasan ini berupa penganiayaan dan pemungutan pajak yang tinggi untuk kepentingan sendiri.

Dalam keadaan yang tidak menentu tersebut kaum revolusioner Kuomintang di selatan memilih Dr. Sun Yat Sen sebagai presiden yang berkedudukan di Kanton. Selanjutnya Dr. Sun meminta bantuan Uni Soviet guna mengatasi krisis dalam negeri terutama untuk membenahi dan mereorganisasi partainya.

---

<sup>6</sup> *The China of Chiang Kai Shek*, Word Peace Foundation, Massachusetts, hal. 124.

Dengan datangnya bantuan Uni Soviet, maka pengaruh unsur-unsur komunis kedalam Kuomintang tak dapat terelakan. Internalisasi ideologi komunis ini terutama disebarkan oleh para penasehat Soviet yang merupakan bagian dari paket bantuan tersebut.

*"The Kuomintang accepted the aid and counsel of Soviet mission invased to China to help the country achieve uni fication and attain full national independence. The nationalist party was recognized and communist admited, workers and peasand were mobilized in union to give the party mass support and a Kuomintang military force was built under party control. And in 1926 the northern expedition was launched against the northern warlords to extend the area of national control."*<sup>7</sup>

Bantuan Soviet itu ternyata cukup besar artinya bagi kekuatan militer Kuomintang, sekaligus merupakan bumerang bagi kehancuran pihak Kuomintang dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan banyaknya kader-kader komunis yang masuk bergabung dengan mendapatkan latihan kemiliteran dan perlengkapan tempur.

Tanggal 12 Maret 1925, Dr. Sun Yat Sen meninggal dunia. Selanjutnya kepemimpinan partai Kuomintang dipegang oleh Chiang Kai Sek. Dibawah kepemimpinannya, pada tahun 1926 Kuomintang melakukan penyerbuan ke utara untuk menumpas warlords yang semakin merajalela dan pada tahun 1927 daerah Wuchang, Hankow, Nanking dan Shanghai berhasil dikuasai.

Sikap politik Chiang terhadap kelompok komunis adalah diametral atau antipati. Sikap ini semakin ditunjukkan dengan mengeluarkan dan menindas kelompok komunis dari partai kuomintang setelah keberhasilan menumpas para jenderal pembangkang. Para aktivis komunis tersebut banyak yang ditembak mati. Sehingga kerjasama nasionalis -komunis inipun berakhir.

*"The First coalition (1922-1927) of Kuomintang and Communist was therefore not the democratic competition of two parties with different stresses upon a ideological foundation, but a war time alliance of basically common incompactible forces. After 1927 break, the Kuomintang become the only legal party in most country, while the communist with a revel army, an unrecognized government, and a territory of their own words."<sup>7</sup>*

Sikap kejam Chiang terhadap kaum komunis semakin menjadi-jadi. Penangkapan dan pembunuhan terhadap pengikut komunis dilaksanakan semakin gencar. Guna menghindari tekanan kaum nasionalis maka kaum komunis menyingkir ke selatan, di daerah pegunungan Kiangsi dan bertahan hingga tahun 1934.

Sementara itu Chiang Kai Shek meneruskan misinya ke wilayah utara, pada tahun 1928 ia bersama pasukannya memasuki kota Peking, dan Chang Tso Ling, salah seorang Warlord yang tersisa dengan wilayah kekuasaan Manchuria berhasil didesak mundur ke Mukden, yang kemudian berhasil dibunuh sedangkan anaknya Chang Hsueh Liang menyatakan menyerah kepada Chiang Kai Shek.

Dengan demikian pada tahun 1928, Cina telah berhasil dipersatukan oleh Chiang Kai Shek. Semua warlords menyatakan setia kepada Chiang Kai Shek. Selanjutnya Chiang memindahkan ibukota dari Nanking (ibukota selatan) ke Peking yang artinya ibukota utara. Selanjutnya Peking diganti namanya menjadi Peiping atau Beijing yang berarti perdamaian utara.

Walaupun telah berhasil menyatukan Cina, Kekuasaan Chiang ternyata tidak sekuat yang dibayangkan. Hal ini terbukti dengan kegagalan demi kegagalan Chiang

---

<sup>7</sup> *China US Policy Since 1945*, Op. Cit, Hal 75.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 159.

menumpas kaum komunis yang dipimpin Mao Tse Tung, Chu Teh dan Chou En Lai. Selain itu para warlords di daerah mulai menampakkan sikap membangkang, sehingga kekacauan masih sering terjadi.

Selain berusaha menyatukan Cina sebagai perwujudan cita-cita Kuomintang, Chiang ternyata juga merupakan seorang diplomat yang ulung. Dengan segala kemampuannya, ia telah berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan dari Amerika Serikat, yang selanjutnya diikuti pula oleh negara-negara yang lain. Dengan kondisi tersebut, semakin memantapkan posisi dan status Republik of China dimata internasional.

*"On July 25, 1928, the United States become the first country to recognize the Nanking government as the national government of Republik of China. China's unification was completed, at least on the surface when the Manchurian province agreed to join the government at the end of 1928."*<sup>9</sup>

Agresi Chiang untuk menumpas kaum komunis terus dilaksanakan. Pada tahun 1934, kedudukan komunis di Kiangsi semakin terjepit, sehingga kaum komunis terpaksa untuk mengungsi ke utara melalui Szechuan, Kansu menuju Shensi. Perjalanan panjang menempuh jarak kurang lebih 12.500 Km yang telah menyebabkan ribuan kaum komunis meninggal tersebut dikenal sebagai *Long March*.

Shensi dan sebagian Kansu kemudian menjadi basis baru bagi kekuatan komunis dengan Yen-an sebagai pusatnya. Sedangkan Chiang Kai Shek yang telah menghabiskan tenaga dan biaya yang cukup besar ternyata tetap belum mampu menumpas kaum komunis. Perhatian Chiang semakin terpecah dengan adanya agresi

---

<sup>9</sup> Ibid, hal. 75.

Jepang pada tanggal 7 juli 1937. Hal ini menyebabkan musuh pihak nasionalis menjadi dua yaitu dari dalam (komunis) dan dari luar (Jepang).

Chang Hsueh Liang pejabat yang bertanggung jawab atas wilayah utara merasa sangat dilematis sebab harus bertarung dengan dua musuh. Untuk itu atas inisiatifnya, ia cenderung memusatkan perhatian pasukannya guna melawan Jepang dan secara diam-diam menjalin kerjasama dengan komunis.

Ketika Chiang melakukan inspeksi ke utara, pada bulan September 1936, dalam kesempatan tersebut, Chang Hsueh Liang berhasil membujuk Chiang untuk bersedia bekerja sama dengan kaum komunis dalam rangka menghadapi Jepang mengingat semakin gentingnya situasi Cina. Tetapi upaya tersebut tidak mudah begitu saja dengan terlebih dulu menyandera Chiang di kota Xian akibat perundingan antara Chiang dengan Chang selama tiga minggu mengalami Jalan buntu. Setelah di-presure dan diberi jaminan oleh Chang akhirnya Chiang Kai Shek bersedia berunding dengan Chou En lai sebagai wakil dari Kunchantang, istilah lain Partai Komunis Cina. Akhirnya pada tanggal 22 September 1937, terbentuklah aliansi Nasionalis-Komunis (Kuomintang-Kuchantang) yang kedua. Pada saat itu kaum komunis telah mengklaim dirinya dalam sebuah partai yang dikenal sebagai Partai Komunis Cina (PKC).

*"Kuomintang-Communist alliance on September 22, 1937 the united front projected in December 1936 began to take form on that day , the central comite of the Chinese Communist Party issued a manifesto proclaiming abandonment of efforts at insurrection and sovietzation against Japanese aggression. The following day, Chiang announced that the government would give up attempns at military supression of communism in favor of seeking a political settlement."*<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, hal. 77.

Tanggal 25 Desember 1936, Chiang Kai Shek kembali ke Nanking dengan ditemani oleh Chang Hsueh Liang. Hal ini sebagai bukti dari janji Chang dan untuk menunjukkan dirinya adalah seorang patriot sejati. Ketika tersingkir ke Taiwan Chang dikenakan tahanan rumah oleh Chiang. Hingga Chiang wafatpun Chang Hsueh Liang tetap merasakan nyamannya sebagai tawanan istimewa Kuomintang.

Sebenarnya bila diteliti lebih dalam, persatuan tersebut hanya bersifat temporer yang disebabkan adanya musuh bersama (common danger). Antara komunis dan nasionalis sangat sulit untuk bersatu, bila tidak ada sebab yang mendasar. Dapat dibuktikan setelah Jepang kalah, maka persatuan keduanya kembali pecah.

Meletusnya kembali konflik antara partai Kuomintang atau Partai Nasionalis Cina (PNC) dengan Partai Komunis Cina (PKC), menunjukkan intensitas yang semakin tinggi, setelah Jepang menyerah tahun 1945. Perbedaan dalam prinsip dan ideologi serta kepentingan dalam upaya merebut pengaruh teraktualisasi dalam perang saudara tersebut, yang berdampak luas dan cukup serius bagi rakyat Cina.

Pertumbuhan kapitalisme barat dan feodalisme timur yang diimplementasikan di Cina oleh Kuomintang telah berekses terjadinya proletarisasi (kemiskinan) yang mencakup hampir seluruh rakyat Cina, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pembangunan. Proses proletarisasi ini berjalan perlahan tapi pasti.<sup>11</sup>

Konflik antara PKC dengan PNC yang akhirnya berubah menjadi perang saudara ini ternyata disebabkan adanya beberapa faktor penunjang, yaitu :

1. Kondisi masyarakat yang kacau, rasa benci dan tidak puas yang memuncak kepada pemerintah dan pembesar korup, disertai adanya semangat revolusi dikalangan rakyat yang putus harapan.
2. Persaingan dan permusuhan dikalangan penguasa yang sudah kehilangan kepercayaan diri untuk memperbaiki kondisi masyarakat.
3. Tumbuh dan berkembangnya golongan serta partai baru (PKC) yang mampu mempergunakan kesempatan untuk merebut kekuasaan dan mempunyai program untuk menolong masyarakat.<sup>12</sup>

Sementara itu tentara Merah, sebutan tentara komunis Cina, dibawah pimpinan Mao Tse Tung semakin kuat dan berkembang pesat. Dengan menyerahnya Jepang, ternyata mampu memberi kesempatan pada PKC untuk menguasai sebagian besar wilayah Cina utara. Dalam hal ini pihak komunis ternyata telah jauh-jauh hari (pada 1935, ketika mengadakan Long March), menerapkan suatu grand strategi yang cukup jitu dengan mengisolasi kekuatan kaum Nasionalis. Strategi dengan pola ini menyebar dan meluaskan sayap kekuasaan dengan dipusatkan di desa-desa dengan tujuan mengepung kota yang merupakan basis kekuatan nasionalis. Strategi ini dikenal dengan nama "*Desa mengepung Kota*".

Walaupun pihak Chiang menerapkan *counter strategy* dengan jalan melakukan blokade militer yang ketat terhadap pusat-pusat kekuatan komunis ternyata tetap tidak mampu membendung keberhasilan kaum komunis. Strategi yang ditempuh Chiang tersebut ternyata malah semakin membantu kemenangan pihak komunis dalam meraih simpati rakyat. Hal ini disebabkan dengan adanya blokade militer tersebut malah semakin menyengsarakan rakyat. Dan dengan dukungan rakyat yang semakin besar, PKC berhasil meraih kemenangan dalam perang saudara tersebut.

---

<sup>12</sup> Jack Belden, *Naga Merah Lahirnya Sebuah Negara Rakyat Yang Menggetarkan Dunia*, terjemahan Mr. Sumarto Djoyodiharjo, NV. Penerbit W. van Hoeve, Bandung, 1952, hal. 11.

Perang saudara yang berlangsung selama empat tahun (1945-1949), ternyata semakin memperburuk kondisi perekonomian dan stabilitas Cina. Kondisi ini tampak lebih buruk dibandingkan dengan kondisi pasca perang Jepang.

### 2.2.2 Kemenangan Komunis dan Berdirinya Republik Rakyat Cina (People Republic of China)

Dalam perang saudara ini tentara Merah (tentara komunis) bertempur secara gagah berani melawan tentara nasionalis yang dari segi moralitas merosot sehingga sering mengalami kekalahan dalam beberapa pertempuran.

Pada bulan Oktober 1946, Jendral Marshal dari Amerika berusaha mencegah terjadinya perang dengan mengirimkan memorandum kepada presiden Chiang Kai Shek.

*"On October 1, 1946 General George C. Marshal in private memorandum informed President Chiang Kai Shek that he would recommend to President Truman that United State discountinue its effort at mediation unless a basic for agreement is found."<sup>13</sup>*

Usaha tersebut ternyata gagal. Kondisi partai Kuomintang sejak saat itu semakin merosot baik secara militer maupun ekonomi. Disisi ekonomi disebabkan karena bobroknnya mentalitas para pejabat sehingga bantuan ekonomi tidak pernah mencapai sasaran. Sedangkan dalam segi militer kemerosotan ini disebabkan adanya pertikaian antara perwira-perwira tua yang masih setia pada Sun Yat Sen dengan perwira-perwira muda yang hanya mengenal kepemimpinan Chiang kai Shek.

<sup>12</sup> Ibid, hal. 12.

<sup>13</sup> *China US Policy Since 1945*, Op cit, hal. 77.



Sebaliknya pihak komunis semakin yakin akan memperoleh kemenangan dalam perang ini, hal tersebut eksplisit pada pidato radio Mao Tse Tung yang mengatakan :

**“Perang ini, pada hakekatnya ditentukan oleh perjuangan rakyat Tiongkok yang bersenjata melawan kaum ningrat dan diktator, baik untuk mencapai kemerdekaan maupun untuk demokrasi; dalam keadaan seperti ini keunggulan militer Chiang dan bantuan Amerika hanya menguntungkan untuk sementara waktu saja.”<sup>14</sup>**

Secara realistis persenjataan pasukan nasionalis yang dibantu Amerika jauh lebih baik dan modern dibandingkan yang digunakan oleh pihak komunis yang dibantu Uni Soviet. Tetapi dengan banyaknya perwira yang korup, maka pihak komunis berhasil mendapatkan sebagian persenjataan modern tersebut dari hasil penjualan secara ilegal.

Melalui pidato radio pula Mao menyebarkan strateginya dalam melawan kaum nasionalis, yaitu :

**“1). Menyerang terlebih dulu musuh yang terpecah selanjutnya menghantam musuh yang berkumpul. 2). Merebut tempat-tempat kecil, lalu menduduki kota. 3). Tujuan utama bukan menghancurkan atau merebut kota tapi menghancurkan pasukan musuh. 4). Kumpulkanlah untuk tiap-tiap pertempuran pasukan sebanyak-banyaknya : dua kali, empat kali kalau perlu lima atau enam kali kekuatan musuh. Sehingga mampu mengalahkan musuh dengan sempurna. 5). Bertempurlah hanya jika yakin pasti akan menang. 6). Hancurkanlah musuh, bila ia pindah tempat. 7). Lakukanlah beberapa pertempuran berturut-turut dengan tidak berhenti. 8). Rebutlah semua kota yang pertahanannya tidak kuat, tidak gegabah merebut kota yang punya pertahanan kuat. 9). Cukupilah kebutuhanmu sebanyak mungkin dengan merebut senjata dan menawan serdadu musuh. Sumber perlengkapan adalah di pertempuran. 10). Pergunakanlah waktu diantara pertempuran-pertempuran untuk**

---

<sup>14</sup> Jack Belden, Op cit, hal. 436.

**beristirahat serta menyusun dan melatih kembali pasukan, tetapi tidak boleh terlalu lama agar musuh tidak dapat menyusun diri kembali.”<sup>15</sup>**

Kaum komunis mulai menggempur ibukota propinsi seperti Tsinan dan Postung, setelah merebut beberapa kota kecil, kemudian diteruskan ke kota Mukden dan Tjentsin. Berturut-turut berhasil diduduki, Peking (23 Januari 1949), Nanking (24 April 1949), Wuhan (17 Mei 1949), Shanghai (25 Mei 1949), sehingga pemerintahan nasionalis memindahkan pusat pemerintahannya ke kota Chungking. Tetapi tentara merah terus mendesak dan Chungking jatuh ketangan komunis tanggal 30 September 1949. Pemerintahan Chiang Kai Shek menyingkir ke Chengdu. Sedangkan wilayah kekuasaannya tinggal Tibet dan Taiwan.<sup>16</sup>

Kondisi pemerintahan nasionalis benar-benar bagai di ujung tanduk, mengingat sebagian besar wilayahnya telah jatuh ke tangan kaum komunis. Dan puncaknya, diproklamasikannya Republik Rakyat Cina (People's Republik of China) oleh Mao pada tanggal 21 September 1949, sedangkan pihak nasionalis sebagai the losser menyingkir ke Formosa.

*“People's Republik Proclaimed on September 21, 1949 the Chinese people's political consultative conference met in Peking and proclaimed the People's Republik of China. The conference also adopted the organic law of the central People's government, ratified Mao Tse Tung's new democratic program as the political foundation of the state and on September 27, 1949 renamed the capital Peking (meaning northern capital) in place of Peiping (meaning northern pleace).”<sup>17</sup>*

*“Chairman Mao Tse Tung of the Central People's Government of the People's Republik of China, on the occasions of the establishment of*

<sup>15</sup> Ibid, hal. 439-440.

<sup>16</sup> *Important Document Concerning, The Question of Taiwan*, Foreign Language Press, Peking, 1955, hal. 28.

<sup>17</sup> *China US Policy Since 1945*, Op. Cit, hal. 87.

*the government on October 1, 1949, solemnly declared to the whole world that the Central People's Republic of China is sole legal government representing all the people of China.*"<sup>18</sup>

Sejak diproklamirkan berdirinya RRC, maka secara otomatis Partai Komunis menjadi partai penguasa dan menjadi partai satu-satunya yang ada di RRC. Politik bagi elit PKC bukan lah semata-mata hanya merupakan wahana kompetisi dalam meraih struktural tetapi juga sebagai wadah pengelolaan sumber-sumber daya dan sebagai sarana mobilisasi massa dalam masa-masa kritis. Keyakinan tentang mobilisasi dan perjuangan sebagai inti dari politik, maka kondisi ini menjadi dasar internalisasi nilai-nilai militer-antusiasme, kepahlawanan, pengorbanan dan usaha bersama dapat tertanam secara kuat dan menjadi dasar untuk bersikap dan bertindak laku. Kondisi ini semakin kondusif dengan adanya penghargaan yang tinggi bagi anggota partai yang mampu mengimplemetasikan nilai-nilai tersebut secara sempurna.

Konsep mobilisasi dan perjuangan ini merupakan realisasi dari konsep *the mass line (garis massa)* yang merupakan prinsip pokok dari PKC ketika berjuang merebut kekuasaan.

Konsep ini ternyata memiliki dua sudut pandang, *pertama* merupakan suatu pengakuan pada kenyataan bahwa suatu gerakan tidak akan berhasil bila hanya didukung oleh anggota-anggota partai saja, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat yang meliputi penyediaan pangan dan anggota baru, kegiatan intelegen dan administratif. *Kedua* adalah sebagai kontrol atas tingkah laku kaum birokrat dan

---

<sup>18</sup> *Important Documents Concerning, Op Cit*, hal. 28.

intelektual dengan jalan menugaskan birokrat dan intelektual untuk berinteraksi dengan massa atau rakyat<sup>19</sup>

Garis massa dengan ajaran-ajaran pokok makan, hidup, bekerja dan selalu berkonsultasi dengan rakyat merupakan ungkapan dari rasa senasip dengan rakyat. Beberapa ajaran tersebut merupakan focus utama dari partai tersebut karena kaum komunis tidak dapat berbicara mengenai dukungan dan kewajiban tanpa membicarakan nasib rakyat atau petani. Hal ini ternyata sangat berperan sekali dalam mencapai sukses dalam merebut kekuasaan Cina.<sup>20</sup>

### 2.2.3 Menyingkir Ke Taiwan Dan Menjadi Naga Asia

Kekalahan pihak nasionalis ini selain berimplikasi berdirinya negara RRC, juga berimplikasi lainnya dengan tersingkirnya kaum nasionalis pimpinan Chiang Kai Sek tersebut ke pulau Taiwan (Formosa).

*"After the Chinese, Communist conquered mainland China in 1949, the Chinese Nationalist Government moved to Taiwan, generalissimo Chiang Kai Shek, the President of Nationalist Government, made Taipei the Capital of Republic of China."<sup>21</sup>*

Sebelum pecah perang Korea tahun 1950, kebijaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat dalam masalah Cina adalah *Hands of China Policy*, yang menganggap persoalan antara Cina dan Taiwan adalah persoalan intern Cina yang harus diselesaikan sendiri oleh Mao Tse Tung dengan Ciang Kai Shek.

<sup>19</sup> Colln Mac. Andrews dalam *Perbandingan Sistem Politik*, Mochtar Mas' oed (ed) Fisipol UGM, Rockefeller Foundation, Gajah Mada University Press, 1978, hal. 163.

<sup>20</sup> Ibid, hal 163

<sup>21</sup> *En cylopedie Almanac 1970*, New York Time, hal. 887.

Pecahnya perang Korea bulan Juni 1950 membuat USA harus merevisi kebijakan luar negerinya. Dalam peristiwa perang Korea tersebut, peran penting RRC dalam membantu pihak Korea Utara tampak jelas, kondisi ini menyebabkan Amerika Serikat berkeyakinan tentang kemungkinan adanya invasi militer RRC ke Taiwan. Pada tanggal 27 Juni 1950, Presiden Truman menyatakan serangan kaum komunis terhadap Taiwan berarti merupakan ancaman bagi keamanan Amerika Serikat<sup>22</sup>.

Presiden Truman memerintahkan armada VII Amerika Serikat untuk mencegah setiap serangan RRC ke pulau Formosa, dan menghimbau pihak Taiwan agar siap siaga menghadai setiap ancaman baik dari laut maupun udara. Armada VII harus bertanggung jawab tentang stabilitas keamanan Taiwan sama seperti Jepang<sup>23</sup>

Pernyataan Truman tersebut ternyata mendapat tanggapan keras dari pihak RRC, melalui menteri luar negerinya saat itu, Chou En Lai mengatakan akan menunjukkan tekad besar rakyat Cina untuk melawan campur tangan militer pihak asing, terutama USA, dalam masalah Taiwan dan akan terus berusaha membebaskan Taiwan dari kaum Nasionalis.<sup>24</sup>

Tindakan Presiden Truman ini ternyata menjadi dasar kebijakan luar negeri USA dalam konflik dua Cina. Hal ini tampak dengan dilanjutkannya kebijakan tersebut pada masa pemerintahan Presiden Eisenhower, dengan mengakui hanya Pemerintahan Chiang Kai Shek sebagai pemerintahan sah bagi Cina pada tahun 1952. Untuk semakin memperkuat kebijakan ini, USA melakukan perjanjian pertahanan dengan Taiwan yang

<sup>22</sup> Robert L. Downen, *The Tattret China Card, "Reality or Illusion United States Strategy ?"*. Preager, New York, 1984, hal. 22.

<sup>23</sup> *Important Documents Concerning*, Op Cit, hal. 16.

diratifikasi pada Desember 1954. Perjanjian pertahanan ini dikenal dengan *United States-Republic of China Defence Treaty*.

Dibidang ekonomi Amerika membantu dana sebesar \$ 1,5 juta/tahun, selama 1950-1960. Dan implikasinya pertumbuhan ekonomi Taiwan cukup pesat sejak 1952. Tingkat ICP (Income per Capita) dari pertumbuhan GNP (Gross National Product) sampai tahun 1972 adalah 5,6 %. Hal inimelebihi tingkat pendapatan percapita bangsa berkembang lainnya termasuk RRC.<sup>25</sup>

Begitu pula kedudukan Taiwan dalam hal ini Republic of China sebagai wakil tetap Cina di PBB dan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, tetap tidak berubah hingga tahun 1971. Dengan keberhasilan RRC menggeser posisi Taiwan di DK PBB, melalui usaha-usaha politik yang cukup rumit.

Kepentingan Amerika Serikat di Taiwan dengan upaya melindungi eksistensinya berkaitan dengan posisi vital pulau tersebut sebagai mata rantai dengan Jepang dan Philipina bagi strategi USA dalam upaya membendung meluasnya pengaruh komunis, yang mana saat itu didunia telah terjadi persaingan ideologi antara liberalisme dikomandani USA melawan komunisme dengan komando Uni Soviet juga RRC sebagai sekutu paling dekat.

Bergesernya posisi Taiwan dalam percaturan politik dunia terutama di DK PBB ini disebabkan perubahan sikap USA dalam melihat arti strategis pulau tersebut sebagai posisi yang paling dominan dalam membendung pengaruh Soviet. Amerika

---

<sup>24</sup> Ibid, hal. 14.

Serikat memandang bahwa dengan terjadinya persaingan sengit antara Soviet dan RRC pada dekade akhir 1960-an, memberikan peluang bagi USA untuk menggunakan RRC sebagai mitra dalam menghadapi musuh bebuyutannya Uni Soviet. Perubahan tentang strategi detente USA ini semakin kuat dengan keputusan Presiden Jimmy Carter untuk melakukan normalisasi hubungan dengan pemerintah RRC pada Januari 1979.

Bila ditinjau perkembangan Taiwan sejak tersingkirnya Kuomintang dari daratan, maka dapat disaksikan suatu perjuangan tak kenal lelah untuk memantapkan pemerintahan berdasarkan pedoman San Min Chu I, dan dari posisi terjepit tersebut, dunia dibuat terperangah dengan keberhasilan dibidang ekonomi dari Taiwan dimasa-masa yang akan datang. Perkembangan keberhasilan Taiwan tersebut merupakan suatu kejadian fenomenal seperti keberhasilan Jepang. Dari sini dapat diasumsikan bahwa bila suatu bangsa diposisikan dalam posisi terdesak/terjepit akan menimbulkan semangat yang besar untuk dapat survival. Sebab pilihannya hanya berjuang atau hancur, walaupun berjuang belum tentu berhasil tetapi lebih baik dari pada menunggu kehancuran tanpa ada tindakan.

Pertumbuhan Taiwan memang sangat pesat terutama dibidang ekonomi hingga tahun 1965, negeri ini sudah tidak memerlukan bantuan dari Amerika Serikat. Seperti pernyataan Amerika bahwa pertumbuhan ekonomi Taiwan sangat mengesankan

---

<sup>25</sup> Norma Schroder, *Economic Costs and Benefits*, dalam Remon H. Myers (ed), *Two Chinese States : U.S. Foreign Policy and Interest*, Hoover Institution Press, California, 1979, hal. 25.

sehingga bantuan USA sudah tidak dibutuhkan lagi dengan adanya surplus neraca perdagangan yang berhasil dicapai oleh Taiwan.<sup>26</sup>

Bagaimanapun peranan Chiang Kai Shek dalam keberhasilan ini tak dapat terbantahkan. Dengan kemampuannya sebagai ideolog ulung yang merancang *blue print* kemajuan Taiwan, ia mengimplementasikan pokok-pokok pikiran Dr. Sun Yat Sen dalam bentuk program-program empiris sehingga membawa negara pulau itu-- tak ubahnya bak sebuah propinsi-- menjadi maju dan makmur.

Presiden Chiang menekankan penanaman semangat kejuangan untuk mandiri sangat berimplikasi pada perubahan bagi negara kelak dikemudian hari, dengan berpijak pada tekanan-tekanan spiritual yang sepanjang jamannya mampu menjatuhkan kerajaan-kerajaan, kebudayaan dan bangsa Cina.

Determinasi agama mewarnai seluruh interpretasi Chiang terhadap komunisme, yang di barat dipandang sebagai filsafat politik dan ekonomi, tetapi baginya merupakan semangat jahat.<sup>27</sup>

Ternyata kekuatan spiritual ini yang dipercaya Chiang untuk melawan intervensi pengaruh komunis. Dalam pidato tahun baru 1962, Chiang mengemukakan

*"We all know that in fighting communism, spiritual strength counter more than military strength, and Taiwan is symbol of the the spiritual struggle that has been on trough the ages and now its reaching the dimax. It is the last act of the tragedy, because the future of mankind depends on the out come of this conflic with communism."*<sup>28</sup>

<sup>26</sup> *Encyclopedic Almanac*, Loc Cit.

<sup>27</sup> W.G. Goddard, *The Makers of Taiwan*, China Publishing, Taipei, Taiwan, hal. 146.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 155-156.



Berulang-ulang Chiang Kai Shek menekankan kepada pengikutnya bahwa tujuan dari pembangunan Taiwan adalah untuk membuktikan dan menunjukkan pada masyarakat daratan bahwa nasionalisme jauh lebih baik dan mampu membawa rakyatcina ke jenjang kemajuan dan kemakmuran.

Selain itui Chiang tetap bercita-cita untuk merebut kembali daratan Cina, dengan sukses yang diperolehnya di Taiwan dapat dijadikan petunjuk yang baik untuk melatih dan mendidik pegawai serta administrasi, bila daratan dapat direbut kembali nantinya. Keinginan Chiang ini tampak dalam himbauannya bahwa mereka (Kuomintang) adalah satu-satunya pemerintah nasional Cina yang sah dan tugas sucinya adalah membebaskan daratan Cina dari cengkraman komunis.<sup>29</sup>

Walaupun demikian secara rasional Chiang Kai Shek menyadari bahwa keberhasilan misi tersebut memerlukan waktu yang panjang dan penuh dengan pengorbanan. Tapi ia tetap optimis kalam hal tersebut dapat dan harus dicapai, karena kejatuhan rezim komunis merupakan prasyarat mutlak bagi perdamaian dan demokrasi di Asia, tentunya pula stabilitas kawasan Pasifik. Selain itu peradaban dunia juga tergantung pada Cina dengan penduduk yang besar, wilayah yang luas dan serta potensi lainnya akan tetap bertahan pada kosep komunisme atau kembali kekubu demokrasi.

Keberhasilan RRC mengeser pemerintahan nasionalis di dalam DK PBB ternyata malah mulai mendapatkan sikap simpati dari banyak negara. Sehingga hal tersebut membuat posisi Taiwan semakin terisolasi.

Sikap RRC ternyata sangat tegas dalam memandang persoalan Taiwan. RRC dengan tegas menolak usulan atau kosep USA tentang *Two China Policy*. Sikap ini tampak pada pernyataan Menlu Chou En Lai sebagai berikut :

*"Finally, asked about the US. intension to work for a two China policy in the United Nations, Chou said that China (RRC) would flatly refuse to enter the United Nations so long as the nationalist Chinese were represented in that body."*<sup>29</sup>

Setelah posisi Republik of China mulai goyah di PBB Amerika Serikat melalui *Secretary of State William Roger* dalam Sidang Dewan PBB mengatakan bahwa Amerika tidak menentang masuknya RRC dalam PBB tetapi Amerika akan menentang usaha untuk mengeluarkan Republik of China dari PBB.<sup>31</sup>

Dan akhirnya tanggal 25 Oktober 1971, RRC diterima secara resmi sebagai anggota PBB sekaligus menggantikan posisi ROC (Taiwan), meskipun melalui voting dalam menentukannya.

*"On october 25, 1971 following a week of intence debate, the UN general assembly passed the Albanian resolution to admit the People's Republik of China. The vote was 76-35 with 17 abstain. Prior to the vote, the US resolution to declare the expultion of Taiwan an 'important question' requiring a two thirds majority, was defeted 59-55 with 15 abstain. The US resolution for dual representation of the Albanian resolution."*<sup>32</sup>

Kemunduran politis yang cukup besar tersebut ternyata berdampak positif dengan semakin memacu Taiwan dalam kemandirian terutama dibidang ekonomi, sebagai kompensasi guna menutupi kekurangan dibidang politik. Keberhasilan

<sup>29</sup> Lio Tek Tjeng, Jilid II, Op cit, hal. 360.

<sup>30</sup> China, US Policy Since 1945, Op Cit, hal. 200.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

dibidang ekonomi tersebut membawa Taiwan menjadi salah satu negara kaya didunia dan kemampuan ekonominya merupakan yang terkuat setelah Jepang dikawasan Asia.

Sampai saat ini Taiwan masih dikuasai oleh kaum nasionalis yang terhimpun dalam partai Kuomintang. Setelah Chiang Kai Shek meninggal ia digantikan oleh putranya Chiang Ching Kou pada tahun 1975. Chiang Ching Kou sendiri memerintah Taiwan dari tahun 1975-1989. Setelah Chiang Ching Kou meninggal, kekuasaan Republik of China dipegang oleh Lee Teng Hui hingga kini. Proses pergantian kekuasaan tersebut semuanya tidak melalui proses demokrasi, melainkan melalui mekanisme partai. Bila presiden meninggal dunia digantikan oleh ketua Partai Kuomintang yang biasanya telah ditetapkan sebagai putra mahkota.

Republik of China dibawah Lee Teng Hui ternyata tetap memegang garis kebijakan dan politik seniornya sehingga tidak ada perubahan dalam kebijakan internasional Taiwan. Walaupun demikian masih banyak negara yang tetap mengakui pemerintahan Taiwan sebagai pemerintahan yang sah. Pihak Kuomintang pun tetap berusaha untuk mempertahankan pengakuan tersebut dengan lebih aktif menjalin kerja sama terutama dibidang ekonomi.

### BAB III

## DUA CINA DALAM PROSES REUNIFIKASI

### 3.1 Kepentingan Cina Terhadap Taiwan

Kondisi pemerintahan RRC diawal kemerdekaan sangatlah kuat sekali. Hal ini disebabkan dukungan dari rakyat yang sangat besar, sehingga rezim Cina dibawah PKC sangat efektif dalam mengendalikan pemerintahan dan angkatan bersenjataanya. Keabsahan pemerintahan tersebut tampak pula pada soliditas para pendukung rezim revolusi pada saat itu.

Politik luar negeri RRC memiliki ciri yang unik, dengan sikap yang condong kepada Uni Soviet dan sikap konfrontatif dengan Amerika Serikat. Kebijakan lainnya adalah upaya untuk mendapatkan kembali wilayah yang dianggap hilang, seperti Xizang (Tibet), Hongkong, Macao dan Pulau Taiwan. Problem terakhir ini dianggap serius sekali karena menyangkut realisasi *national interest* yakni faktor keamanan nasional serta integritas nasional. Sehingga segala upaya layak untuk ditempuh dalam mewujudkan keinginan tersebut. Tibet berhasil direbut tahun 1959, melalui jalan kekerasan. Sedangkan Taiwan selalu gagal direbut dengan cara yang sama.

Namun bila dikaji, pemikiran nasionalistik kepemimpinan komunis Cina dalam membina hubungan internasionalnya ternyata menekankan sikap defensif sebagai prioritas utama dan dapat dilihat dalam hirarki prioritas perumusan politik luar negerinya sejak 1949 relatif berpegang teguh pada :

1. **Pertahanan melawan serangan militer atau dominasi luar negeri.**
2. **Penyatuan daerah-daerah terpencil dan terasing (terutama Tibet, Sinkiang dan Mongolia Dalam).**

3. Penggabungan Taiwan dalam struktur administratif nasional.
4. Pencegahan campur tangan non-militer asing dalam urusan-urusan dalam negeri Cina.
5. Pembangunan kembali respek/sikap hormat internasional, dan mencapai peranan memimpin dalam urusan-urusan regional dan internasional.<sup>1</sup>

Dengan demikian, masalah Taiwan mendapat prioritas penting dan layak mendapat tempat tersendiri. Sehingga sangat wajar saat pemerintah Taiwan dan USA mengadakan kerjasama militer dan bidang lainnya, RRC sangat keras dalam bereaksi dan mengirimkan protes keras, selain itu juga menganggap Amerika sebagai agresor. Sebelum perjanjian tersebut ditandatangani tahun 1954, Beijing menyerbu ke Pulau Quemoy. Upaya ini ternyata berhasil mendapatkan pulau Tachen, walaupun keinginan merebut Quemoy gagal. Penyerbuan ulangan ke Pulau Quemoy dan Pulau Matsu dilakukan lagi tahun 1958, namun serangan kedua inipun dapat digagalkan oleh pihak nasionalis.<sup>2</sup>

Kegagalan-kegagalan tersebut, ternyata mampu memberikan pengalaman berharga bagi RRC bahwa penggunaan kekerasan tidaklah selalu menjamin keberhasilan dalam merealisasikan keinginan bahkan cenderung merugikan. Apalagi kehadiran armada VII AS di Taiwan harus diperhitungkan oleh pemimpin Beijing bila terus berkeras hati untuk merebut Taiwan melalui jalan kekerasan.

Walaupun demikian kepentingan nasional RRC --penyatuan Taiwan-- tetap harus diupayakan agar dapat terwujud karena berimplikasi pada faktor keamanan nasionalnya secara keseluruhan. Dan menjadi kewajiban setiap negara untuk

---

<sup>1</sup> Walter S. Jones, *Logika Internasional I*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 1992, hal. 180.

<sup>2</sup> James C. F. Wang, *Contemporary Chinese Politics : An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc. 1980, hal. 236.

mempertahankan atau merebut wilayahnya demi keamanan nasionalnya terutama bila ada ancaman dari pihak luar.

Kepentingan RRC terhadap Taiwan sangat besar bila dibandingkan kepentingan Amerika terhadap Taiwan, hal ini seperti diungkapkan oleh Ralph N.

Clough :

*"The interest of the People's Republic of China in Taiwan are obviously more deep-rooted and potentially were important than of United State"*<sup>3</sup>

Hal ini juga disebabkan adanya kekhawatiran pihak RRC yang merasa selalu terkepung oleh negara-negara yang berbatasan dengannya. Ini terjadi akibat adanya konflik perbatasan dengan banyak negara disekitar Laut Cina Selatan dan Timur, misalnya Vietnam, Philipina, Malaysia, Indonesia, Jepang dan Korea Selatan tentunya pula Taiwan juga terlibat didalamnya.<sup>4</sup>

Kekhawatiran ini tak akan muncul secara berlebihan bila hubungan RRC dengan Uni Soviet tidak memburuk. Sehingga layak saat hubungan Beijing-Kremlin memburuk maka perasaan terkepung dalam konflik perbatasan itu muncul. Kekhawatiran terbesar adalah adanya serangan dari pihak nasionalis sewaktu-waktu bila suatu saat RRC sedang sibuk menghadapi konflik dengan negara lainnya. Karena konflik Cina-Taiwan merupakan konflik teritorial yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi konflik terbuka yang melibatkan kekuatan militer kedua belah pihak. Tindakan militer tahun 1955 dan 1958 dapat menjadi bukti konkrit. Meskipun tindakan RRC

---

<sup>3</sup> Ralph N. Clough, *The Taiwan Issue in Sino American Relations*, William J, Barnd. (ed), *China and Amerika : The Search for a New Relationship*, A Council on Foreign Relation Book, New York hal. 153.

tersebut lebih jauh merupakan bentuk respon langsung dari kehadiran militer USA. Sehingga wajar bila RRC khawatir akan adanya serangan Taiwan yang secara de facto akan mendapat bantuan dari armada Amerika. Yang mana kepentingan Amerika terhadap Taiwan menunjukkan substansi yang meningkat. Selain itu RRC menyadari bahwa Taiwan lebih unggul dalam kualitas kemampuan (persenjataan) militer, meskipun RRC unggul dalam kuantitas personel militer. Kondisi ini menjadi pertimbangan yang mendasar terhadap kebijakan luar negeri RRC dalam persoalan Taiwan, sehingga sangat rasional bila Beijing sangat berhasrat besar untuk menyatukan Taiwan walaupun *tidak harus* dengan jalan kekerasan.

Walaupun demikian, RRC tetap waspada terhadap kemungkinan serangan dari pihak nasionalis. Alasan tersebut didasarkan pada prespektif karakter pihak nasionalis yang gemar perang dan keinginan untuk merebut wilayah, sebagaimana himbuan pemimpin tertinggi Chiang Kai Shek bahwa misi Taiwan untuk membebaskan daratan, dan menghancurkan persekutuan keji (evil conspiracy) yang telah menghancurkan kebebasan rakyat Cina daratan. Prinsip ini menjadi ikrar dan diyakini oleh rakyat Taiwan, bahkan dalam mencapai tujuan tersebut langkah apapun wajib diupayakan walaupun dengan pengorbanan ribuan nyawa rakyat Cina.<sup>5</sup>

Dalam hal ini RRC tetap berkeras tetap mengklaim Taiwan sebagai wilayah teritorialnya --Doktrine of Irredentism--, tampaknya kebijakan luar negeri RRC tersebut disebabkan pengaruh kepentingan keamanan nasional dan harga diri

---

<sup>4</sup> Hadi Soesastro dan A. R. Sutopo, *Strategi dan Hubungan Internasional : Indonesia di Kawasan Asia-Pasifik*, CSIS, Jakarta, 1981, hal. 313.

<sup>5</sup> W. G. Goddard, *The Makers of Taiwan*, China Publishing Company, Taipei, China, hal. 162.

nasionalnya. Sikap RRC ini berpijak pada hasil dari kesepakatan Kairo (1943) yang menyatakan bahwa Taiwan merupakan bagian dari integral dari Cina.

Fakta ini memang harus diakui validitasnya, sebab status Taiwan sebelum pecah perang saudara merupakan bagian integral dari pemerintahan Cina diakui oleh banyak negara. Namun kondisi ini berubah semenjak pemerintah nasionalis memindahkan pusat pemerintahannya ke pulau tersebut pada tahun 1949.

Kehadiran armada Amerika berdasarkan perjanjian bersama antara Taiwan dengan USA, dikawasan tersebut merupakan suatu ancaman serius bagi keamanan wilayah RRC. Selain itu bisa diartikan sebagai tantangan bagi kewenangan Beijing atau istilah lainnya merupakan intervensi illegal dalam masalah dalam negeri RRC. Perjanjian pertahanan yang diwujudkan dalam Mutual Defence Treaty oleh Taiwan dan USA tersebut menyebabkan adanya counter aksi dari RRC, apalagi dalam perjanjian tersebut ditandatangani pula posisi Taiwan sebagai bagian dari wilayah yang berada dalam pengawasan militer pihak Amerika Serikat. Seperti yang diungkapkan oleh *Schlender* dalam *Dynamic of World Power*, yaitu :

*"all kinds of unequal treaties and agreements to reduce China to the status of colony and military base of United States"*<sup>6</sup>

Dalam meng-counter tindakan tersebut maka RRC menyatakan sikap yang berpijak pada kepentingan keamanan nasionalnya antara lain :

1. RRC tidak akan membiarkan terjadinya apa yang disebut "lost national territory" oleh karena tindakan militer ataupun cara lainnya dari hasil intervensi negara lain.
2. Berusaha memperoleh kembali "lost national territory" khususnya Taiwan.

---

<sup>6</sup>Schlesinger, *Dynamic of World Power, Documentary History of US Foreign Policy since 1945-1975*, Chelsea House, Mac. Grmw Hill, hal. 68.



3. Membangun perimbangan militer yang favourable dan mengambil bentuk pertahanan konvensional (bukan nuklir) bagi seluruh perbatasan Cina, pertama perbatasan Cina-Soviet, kedua daerah Fukien dari ancaman Amerika Serikat dan Taiwan serta perbatasan Cina-India.<sup>7</sup>

Adanya interaksional RRC-USA ini sebenarnya lebih menunjukkan pada suatu perimbangan kepentingan secara global, sehingga bermakna positif bagi RRC dalam merealisasikan kepentingan-kepentingannya. Dengan kerangka hubungan strategis tersebut RRC mempunyai peluang untuk mempermasalahkan keberadaan Taiwan kepada USA sebagai salah satu agenda yang berkaitan dengan upaya normalisasi tersebut. Dalam posisi tersebut pihak RRC sangat optimis mampu merebut kembali Taiwan dengan jalan damai dan secara cepat.

Kerangka dasar hubungan RRC-Amerika Serikat sebenarnya terjalin akibat alasan-alasan strategis USA dalam menghadapi hegemoni Uni Soviet. Pihak Amerika melihat adanya celah yang dapat dimasuki akibat retaknya hubungan RRC-Soviet. Peluang strategis tersebut ternyata tidak disia-siakan oleh Amerika. Dengan suatu asumsi bahwa kemampuan RRC dapat digunakan sebagai mitra dalam konsep detente guna membendung pengaruh Uni Soviet.

Dalam peristiwa ini RRC mampu melakukan bargaining power dengan Amerika terutama dalam penyelesaian masalah Taiwan dengan dalih berlindung dalam politik detente peaceful Amerika. Beijing sangat menyadari arti penting Taiwan bagi kepentingan nasionalnya, sementara dukungan Amerika sangat kuat terhadap Taiwan sehingga kurang menguntungkan bila ditempuh dengan jalan kekerasan. Selain itu juga kurang menguntungkan dalam posisi politik bagi RRC, maka layak bila cara

---

<sup>7</sup> James C. F. Wang, Op cit, hal. 226.

damai menjadi pilihan yang paling representatif. Hal tersebut terbukti dengan dipenuhinya tuntutan RRC agar mutual defence treaty Amerika-Taiwan dapat dihapus. Perjanjian tersebut dicabut oleh Amerika pada Desember 1979. Padahal sebelum adanya normalisasi tuntutan tersebut selalu ditolak dengan tegas oleh Amerika.

### 3.2 Perimbangan Kekuatan Militer Dua Cina

Pokok bahasan ini sangatlah penting --sebelum mengetahui sikap RRC terhadap Taiwan-- guna mengetahui kekuatan militer masing-masing pihak. Hal ini dibutuhkan sebagai salah satu komponen penting dalam mengurai intensitas konflik Dua Cina. Dan sebagai parameter bila terjadi konflik secara fisik maka kekuatan militer lah yang akan menentukan penyelesaian konflik tersebut, sehingga akan memudahkan dalam memprediksi pihak mana yang bakal unggul.

#### 3.2.1 Profil Militer RRC

Seperti diketahui bersama bahwa angkatan bersenjata alias militer Cina merupakan salah satu armada militer terkuat dan terbesar didunia, ini disebabkan hampir tidak ada kekuatan militer didunia yang memiliki personel dan peralatan sebanyak Cina. Perbandingan kekuatan militer Cina saat ini berkisar tujuh kali lebih besar dibanding kekuatan Taiwan.

Angkatan udara Cina dilengkapi sekitar 4970 pesawat, merupakan armada ketiga terbesar dunia. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 3000-an yang masih aktif dan itupun hampir semuanya pesawat kuno. Pesawat itu mayoritas adalah modifikasi

---

pesawat tempur Uni Soviet yang dibeli Cina dekade 1960-an. Pesawat-pesawat itu antara lain jenis tempur J-5, J-7, J-8 dan pesawat pembom H-5 dan Q-5 jenis Fantan.<sup>8</sup> Selain itu Cina juga membeli 24 helikopter tempur jenis Sikorsky Blackhawk dari Amerika, tahun 1986-an.

Upaya modernisasi Kemampuan angkatan udara, juga dilakukan oleh Cina dengan membeli 26 pesawat tempur canggih Sukhoi (Su)-27 yang dapat digunakan disegala medan. Selain itu modernisasi peralatan pendukung matra udara juga ditingkatkan dengan memperbaharui sistem radar dan navigasi serta fasilitas penunjang lainnya. Berbagai macam percobaan rudal baik udara ke udara maupun udara ke laut dilakukann, dalam rangka mempertanggung dan meningkatkan kredibilitas armada udaranya.

Tabel 3.1  
KEKUATAN ANGKATAN UDARA CINA

Jenis	Tipe	Jumlah
Pembom : Medium Light	H-6	120
	H-5	350
Tempur (ground attack)	Q-5	500
Tempur udara	J-5, J-7, J-8	1000
	J-6/B/D/E	300
	Su-27, Su-27/B	20
Pengintai	HZ-5, JZ-5, JZ-6	360
Pengangkut	II-18, II-4, II-76, Li-2, Y-5, Y-7, Y-11, Y-12	± 600
Helikopter	As-332, Bell214, Mi-17, S- 70, C-2, Mi-6, Z-5, Z-6, Z- 8, Z-9	+400

Sumber : *Military Balance, 1994-1995*

<sup>8</sup> Chong pin Lin, *The Military Balance in The Taiwan Straits*, dalam *The China Quarterly*, no 146, hal. 19-20, June 1996. Lihat juga pada Kenneth W allen, Glenn Krumel & Jonathan D.

Kekuatan angkatan laut Cina saat ini (1995) berkekuatan sekitar 260.000 personil dan 1300 kapal perang. Kondisi persenjataannya ternyata mirip dengan kondisi angkatan udaranya. Hingga tahun 1980-an, angkatan laut Cina hanya mengan dalkan empat buah kapal selam jenis Han yang berkekuatan nuklir, dan kapal selam jenis Xia yang mampu membawa rudal berhulu ledak nuklir. Untuk tahun 1991, Cina mulai memodernisasi armada lautnya, dengan memproduksi masing-masing dua kapal penghancur yaitu jenis Luhu dan Luda III. Selain itu juga memproduksi kapal pencegat jenis Jiangwei, satu kapal peluncur nuklir jenis Houxin dan kapal angkut jenis Dayun. Kekuatan kapal selamnya saat ini terdiri dari 44 kapal selam. Dengan jenis terancangih adalah Kilo.<sup>9</sup>

Tabel 3.2

## KEKUATAN ANGKATAN LAUT CINA

Jenis	Tipe	Jumlah
<u>Kapal selam</u>		
- Strategic submarine	Kilo	1
- Tactical submarine	Han, Romeo, Ming	55
<u>Kapal Perang Tempu</u>		
- Destroyer	Luhu, Luda	18
- Frigates	Jianghu, Jiangdong, Jiang nan	37
<u>Kapal Patroli ,PertahananPantai</u>		
- Missile Craft	Huang, Houxin, Huangfeng	217
- Torpedo Craft	Huchun	160
- Inshore	Shanghai, Huludao, Shantau	350
- Coastal	-	100
- Patroli	-	495
- Amphibi	Yukan, Shan, Yuliang, Yuling	51

Sumber : *Military Balance, 1994-1995*

Pollack, *China's Air Force Enter the 21<sup>st</sup> Century*, RAND, 1995

<sup>9</sup> Chong-pin Lin, *Op Cit*, hal 120-122

Angkatan darat Cina saat ini berkekuatan 2,2 juta personil, kira-kira tujuh kali lebih besar dibandingkan kekuatan AD Taiwan. Jumlah yang besar ini ternyata masih tak seimbang dengan populasi penduduk Cina yang hampir 2 milyar. Selain itu pengalaman tempur AD RRC ini masih sangat minim sekali. Lebih jauh kekuatan matra darat Cina ini dapat dilihat ditabel.

Tabel 3.3

**KEKUATAN ANGKATAN DARAT CINA**

Jenis	Tipe	Jumlah
Main Battle Tank (MBT)	T-54, T-34/85, T-559, T-69, T-79, T-80, IIM	7500-8000
Light Tank	T-63, T-62	1200
Armoured Personal Carrier		2800
Towed Artillery	Berbagi jenis	4500

Sumber : *Military Balance 1994-1995*

### 3.2.2 Profil Militer Taiwan

Dalam membahas profil kekuatan militer Taiwan akan tampak gambaran kekuatan yang kecil secara kuantitas tapi cukup tangguh dalam kualitas. Dengan bantuan Amerika dan negara-negara eropa maka Taiwan melakukan modernisasi angkatan bersenjataanya sejak tahun 1970-an. Selain itu sejak 1980-an Taiwan secara bertahap berhasil mengembangkan industri dan teknologi militernya secara mandiri. Sehingga pada dasawarsa 1990-an negara ini telah mampu mengekspor persenjataan militernya.

Angkatan udara Taiwan memiliki sekitar 200 pesawat tempur dari berbagai jenis. Kemampuan ini ditunjang dengan sistem pertahanan udara yang cukup tangguh, hal ini dapat dilihat dengan dirampungkannya *Chiashan Project*. Selain itu Taiwan juga telah berhasil memproduksi rudal darat ke udara Tiangong dan Tien Chien yang dapat ditempatkan disegala medan dan berfungsi baik disegala cuaca. Selain proyek Chiashan, Taiwan dilengkapi pula dengan piranti sistem radar peringatan dini di udara jenis E-2T. Kekuatan udara ini semakin kuat dengan pesawat hasil industri militernya yaitu pesawat jenis Ching-kou, disamping pesawat F-5 dan F-104 yang telah ada beserta parangkat rudal AIM -7 Sparrow, AIM-9J Sidewinder<sup>10</sup>. Lebih jauh kekuatan udara Taiwan dapat lihat di Tabel berikut :

Tabel 3.4

## KEKUATAN ANGKATAN UDARA TAIWAN

Jenis	Tipe	Jumlah
Tempur udara( Ground attack) : 14 skuadron	F-5 E	277
	F-104	94
	Ching-kou	22
	F-100 Sabre	44
Pengintai : 1 Skuadron	RF-104G	6
Pengangkut		77
Air Craft	C-47, C-118B, DC-6B	±27
Helikopter	CH-34, S-62A, S-70	20

Sumber : *Military Balance 1994-1995*

Angkatan laut Taiwan telah memiliki tujuh armada laut yang terdiri 160 kapal dan 34 helikopter bersenjata. Kapal-kapal itu meliputi kapal selam, kapal perusak,

<sup>10</sup> US Defence Secretary Brown's Statement On US-China ?Taiwan Policy, Washington Viewpoint, US Embassy, Jakarta, February 7, 1979, hal 5-6

kapal pencegat dan kapal patroli dengan kekuatan rudal. Armada laut ini sebagian merupakan hasil pembelian ke negara-negara eropa, seperti kapal selam jenis Zwardvis yang dibeli dari Belanda dan kapal pencegat kelas Knox dari Amerika. Tahun 1993, Taiwan berhasil memproduksi rudal yang kemampuannya setar dengan rudal Perri buatan AS. Rudal-rudal itu untuk melengkapi armada lautnya terutama jenis pencegat. Lebih jelasnya dapat dilihat ditabel berikut ini :

Tabel 3.5  
KEKUATAN ANGKATAN LAUT TAIWAN

Jenis	Tipe	Jumlah
Kapal Selam	Hai Lung, Hai Shih(Zwardvis)	4
Kapal Perang Tempur - Destroyer - Frigates	Chien Yang, Fu yang, Po yang Cheng kun, Tien Shan, yang	22 11
Helikopter	Hughes, silorsky, Kaman	34
Patroli & Pendukung - Misile Craft - Patroli - Amphibi	Lung Chiang, Hai Cu Kao Hsiang, Chung , Mei Lo	52 45 26

Sumber : *Military Balance 1994-1995*

Angkatan darat Taiwan didukung sebanyak 316.000 personil. Perkembangan angkatan darat Taiwan ini ternyata tidak cukup menggembirakan bahkan pada tahun 1986 sempat melakukan rasionalisasi personil sebanyak 56.000 orang. Tetapi hal ini tidak menyurutkan langkah peningkatan kualitas persenjataan. Hal ini terbukti dengan adanya pembelian 42 buah senjata tangan jenis Super Cobra AH-1W dan 26

Helikopter jenis ScoutOH-58D. Sekitar 550 buah tank jenis Menghu M-48 berhasil diproduksi pada pertengahan 1994 dan tentunya terus berproduksi hingga 500 unit akhir 1999. Tank ini memiliki kehandalan dalam jarak tembak dan ketepatan menembak. Selain itu Taiwan juga membeli tank jenis M60 A3 buatan Amerika sebanyak 120 unit. Lebih jauh kekuatan matra darat Taiwan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

## KEKUATAN ANGKATAN LAUT TAIWAN

Jenis	Tipe	Jumlah
Main Battle Tank (MBT)	M-48A5, M-48A3, M-48H	± 500
Light Tank	M-24, M-41	± 905
Armoured (infantry) Fighting vechicle	M-113	225
Armoured Personal Carrier	M-113, V-150(commando)	850
Toward Artilery	Berbagai jenis	+2500

Sumber : *Military Balance 1994-1995*

Dari uraian dan sajian beberapa tabel tersebut terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kekuatan militer Cina dengan kekuatan Taiwan. yang saling betolak belakang. Secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini



Tabel 3.7

## PERIMBANGAN KEKUATAN MILITER CINA - TAIWAN (1994-1995)

	Cina	Taiwan	Rasio
Total Personil Militer	2.930.000	425.000	6,6
Rudal Jelajah antar benua	17	0	
Rudal Jarak Menengah	70	0	
Pesawat Tempur	4524	393	10,1
Pesawat Pembom	470	0	
Helikopter	400	23	17,3
Kapal Selam	56	4	12,5
Kapal Penghancur	18	22	
Kapal Pengebati	37	11	
Tank	9500	1400	7,7

Sumber : *Military Balance 1994-1995*

Tabel diatas secara gamblang memetakan kekuatan kedua Cina tersebut. Dan dapat dipastikan Cina unggul dalam sisi kuantitas tetapi kalah dalam sisi kualitas militer dari pihak Taiwan. Kualitas tempur Taiwan lebih unggul baik secara persenjataan maupun kualitas tempur personil yang banyak menimba ilmu di barat.

Dengan demikian penggunaan kekerasan bagi pihak Cina dalam penanganan konflik Dua Cina perlu dipertimbangkan. Hal ini selain akan menyebabkan instabilitas politik dikawasan ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak pendek untuk mengalahkan Taiwan dalam peperangan. Dan ini tentunya akan mempertaruhkan kredibilitas RRC dimata dunia. Tetapi bagaimanapun, bukan berarti pihak RRC tidak akan menggunakan kekuatannya bila pihaknya terdesak dan perlu diingat Cina

merupakan negara yang memiliki kekuatan nuklir yang cukup potensial sehingga bukan khayalan lagi bila kekuatan itu nantinya akan dipergunakan bila posisinya terdesak.

### 3.3 Sikap Cina Terhadap Taiwan Menuju Reunifikasi

Cita-cita Cina untuk menyatukan Taiwan sebagai kawasan yang dianggap hilang (lost nasional teritory) tetap tidak berubah, sikap ini dimotivasi oleh keinginan merealisasikan kepentingan nasionalnya terutama keamanan nasional (telah dijelaskan pada bagian terdahulu). Konsep penyatuan Taiwan ini ternyata pada tataran langkah operasional pewujudan cita-cita tersebut sering mengalami perubahan dalam kerangka strategi maupun taktik. Perubahan tersebut merupakan dampak dari kondisi global terutama fakta USA sebagai determinan utama dalam konflik dua Cina ini.

Usaha RRC dalam mengintegrasikan Taiwan dalam wilayahnya telah dimulai sejak berdirinya RRC (1 Oktober 1949) yang berlangsung hingga saat ini. Walaupun usaha tersebut masih belum mendapatkan hasil yang optimal. Perjuangan ini sangat rumit dan panjang disadari sepenuhnya oleh pihak Beijing, tetapi dalam persepsi RRC tidak ada istilah macet/buntu dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan.

Setelah usai perang saudara, RRC cenderung menggunakan kekerasan dalam rangka penyatuan Taiwan. Pendekatan ini digunakan pemerintah Beijing era 1949-1960. Penggunaan kekerasan -dalam hal ini adalah penggunaan segala piranti militer- dipilih bukan tanpa didasari oleh suatu argumen. Alasan-alasan tersebut penulis

bedakan dalam dua aspek :

1. *Aspek intern*, berupa rasa heroik dan semangat kemenangan yang masih berkobar pasca perang saudara. Alasan yang terkesan emosional ini ternyata berdampak serius pada proses-proses kebijakan tentang Taiwan kala itu. Adanya rasa optimisme akan kekuatan militer yang berlebihan tersebut membawa implikasi akan penggunaan kekerasan sebagai solusi alternatif dalam upaya reunite Taiwan. Selain itu ada pandangan berdasarkan tradisi bahwa kemenangan komunis tidak akan lengkap sebelum Taiwan dapat dipersatukan. Kegagalan penyatuan Taiwan dapat ditafsirkan sebagai tanda bahwa mereka (pemimpin RRC) belum mendapat restu dari langit sebagai pemimpin Tiongkok.
2. *Aspek ekstern* adalah turut campurnya Amerika Serikat dalam masalah Dua Cina. Menurut RRC, sikap USA yang telah melakukan perjanjian dengan Taiwan (Mutual Defence Treaty) dianggap sebagai intervensi terhadap masalah dalam negeri RRC.

Namun tekad RRC untuk membebaskan Taiwan tidak menyurut tetapi semakin berkobar. Tekad tersebut tidak dapat dihalangi hanya dengan penempatan Armada VII AS. Menurut Chou En Lai, "Meskipun terdapat pemindahan militer AS ke wilayah tersebut, Cina tidak akan menarik kembali keinginan membebaskan Taiwan."<sup>11</sup> Keinginan itu juga selaras dengan isi Pembukaan Konstitusi RRC Alenia 7, yang

<sup>11</sup> *Important Document Concerning the Question of Taiwan*, Foreign Language Press, Peking, 1955, hal. 17-20.

## BAB V

### KESIMPULAN

Dalam *world politic* saat ini sepertinya ada Dua Cina, yaitu Republik Rakyat Cina yang berkuasa di Cina daratan dan Republik Cina yang berpusat kekuasaan di pulau Taiwan. Walaupun memiliki konteks dan peran yang berbeda di dalam sistem internasional, tetapi keduanya merupakan dua buah entitas politik yang memiliki kedekatan setidaknya bila ditinjau dari aspek historis, mereka ternyata pernah menjadi satu kesatuan.

Cina dan Taiwan merupakan sebuah *divided nation*, yaitu dua bangsa yang memiliki kesamaan etnis, tradisi sejarah dan tentunya pernah menjadi satu kesatuan politik dulunya. Keberadaan keduanya diakibatkan terjadinya perang saudara yang terjadi era 1945-1949, yang mengakibatkan tersingkirnya kaum nasionalis dibawah partai kouwintang ke Pulau Taiwan. Sedangkan wilayah daratan dikuasai oleh kaum komunis yang identik dengan Partai Komunis Cina.

Perang saudara ini sebenarnya bersumber pada konflik kepentingan antara Partai Kouwintang dengan Partai Komunis Cina. Karena kedua partai tersebut mampu melakukan proses ideologisasi maka konflik tersebut secara serentak melibatkan massa fanatik kedua partai. Hal ini tak terlepas dari peran pemimpin kedua partai yang merupakan para ideolog ulung yaitu Dr Sun Yat Sen di bantu Chiang Kai-shek disatu sisi dan Mao Tse Tung disisi lain.

Menyingkirnya rezim nasionalis ke Taiwan, bukan berarti tanda berakhirnya konflik melainkan semakin membuat rumit konflik tersebut. Kedua pemerintahan ternyata sama-sama mengklaim dirinya sebagai wakil Cina yang sah di dunia internasional. Keduanya pun ternyata memiliki klaim yang sama tentang wilayah teritorialnya. Wakil Cina awalnya di PBB adalah pemerintahan nasionalis yang berbasis di Taiwan. Kondisi ini berubah dengan adanya normalisasi hubungan antara pemerintahan RRC dengan Amerika Serikat, dengan demikian Beijing menggantikan kedudukan Taiwan dikursi Dewan Keamanan PBB.

Keberhasilan rezim komunis Cina ini tak lepas dari adanya perubahan strategi dalam upaya menyatukan wilayah Cina. Strategi yang selama ini lebih menonjolkan kekuatan militer telah dirubah melalui pendekatan damai. Perubahan ini diambil karena pendekatan militer dirasa kurang efektif dan memakan waktu lama apalagi adanya hubungan dekat Taiwan dengan AS yang diikat dalam perjanjian keamanan bersama tentunya tak dapat diabaikan begitu saja.

Walaupun demikian, upaya upaya damai atau lebih dikenal dengan sebutan reunifikasi tersebut hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Sampai saat ini Taiwan tetap independen diluar kedaulatan Cina dan telah berhasil melakukan liberalisasi ekonomi dan politik.

Munculnya Deng Xiaoping sebagai pemimpin tertinggi RRC ternyata semakin membuat Cina lebih intensif guna menyatukan wilayahnya yang hilang (Taiwan, Hongkong dan Macao). Dan prioritas pertama tetap pada penyatuan Taiwan. Keinginan ini semakin kuat, setelah pemerintahan Beijing berhasil

menuntaskan perjanjian dengan Inggris dan Portugal guna proses pengembalian Hongkong dan Macao.

Ditengah gencarnya Cina menawarkan penyatuan dengan Taiwan, terjadi suatu kasus yang cukup menarik untuk dianalisis, yaitu berlangsungnya Pemilu Presiden pertama di Taiwan yang akan berlangsung tanggal 23 Maret 1996. Dari sejak awal, Cina telah tegas akan menggunakan kekuatan militer bila dalam pemilu tersebut akan diarahkan menuju proses deklarasi kemerdekaan atau pemisahan diri dengan pihak daratan. Cina akan melakukan serangan bersenjata untuk memaksa Taiwan kembali bersatu bila penguasa pulau tersebut menerapkan kebijakan yang dapat merusak upaya-upaya reunifikasi.

Pemilu Taiwan ini dapat dilihat sebagai salah satu bukti usaha-usaha untuk melepaskan diri. Pelaksanaan pemilu yang tak melibatkan Beijing sudah merupakan ukuran bahwa seolah-olah Taiwan merasa dirinya tak memiliki keterkaitan apapun dengan Cina daratan. Dan wajar bila kemudian RRC menyiapkan segenap kekuatan tempurnya bila negara pulau tersebut benar-benar memisahkan diri.

Situasi di selat Taiwan menjelang hari pemilihan tampak semakin memanas. Kedua Cina --terutama Beijing--telah menyiagakan semua peranti tempurnya disemua matra militer. Hal ini tentunya menimbulkan kecemasan di dunia internasional, sehingga suara keprihatinan dan kecaman telah dilontarkan oleh beberapa pemimpin negara untuk menyingkapi kondisi kawasan tersebut.

Ketika pemilu berjalan dengan lancar dan tidak ada upaya tegas pihak Taiwan untuk memerdekakan diri, maka pihak Beijing pun menarik kembali semua

armada yang telah di siap-siagan tersebut. Dan ini menandakan kedua belah pihak sama-sama tidak serius dengan ancamannya. Hal ini disebabkan adanya sikap realistis dari kedua pihak untuk tidak saling memaksakan kehendak. Dengan kata lain kedua pihak masih menyepakati bahwa unifikasi adalah pilihan yang paling realistis bagi masa depan keduanya. Walaupun proses kearah itu bukan merukan hal yang mudah.

Dapat disimpulkan, bahwa sikap Cina terhadap Taiwan tetap akan menerapkan upaya damai dalam proses unifikasi tetapi Cina tak akan membiarkan Taiwan memisahkan diri, dan bila itu terjadi berarti kekuatan militerlah yang akan menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah Cina cenderung lebih suka menerapkan kebijakan Status Quo dalam berbagai persoalan ketegangan dengan Taiwan.

Sedangkan keberhasilan proses reunifikasi Dua Cina, saat ini tergantung bagaimana Cina dapat menyakinkan Taiwan akan keberhasilan dan efektifitas konsep One Country Two System yang sedang berlangsung di Hongkong dan Macao. Ketika kedua daerah tersebut dapat menerima penerapan dan dapat menunjukkan kemajuannya maka hal ini dapat menjadi modal kuat bagi reunifikasi. Dan keberhasilan Dua Cina bersatu ini bukan hanya diinginkan oleh kedua cina tetapi juga sangat dinanti-nanti oleh masyarakat internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Doak Barnett, *China Policy : Old Problems and New Challenges*, The Brookings Institution, Washington DC, 1977,
- \_\_\_\_\_, *US Arms Sales : The China-Taiwan Tangle*, The Brookings Institutions, Washington DC, 1979
- An, *China, US Policy Since 1945*, Congressional Quarterly Washington DC, 1980 ✓
- An, *Encyclopedic Almanac 1970*, New York Time,
- An, *Important Document Concerning, The Question of Taiwan*, Foreign Language Press, Peking, 1955, .
- An, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1994.
- An, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1996.
- An, *Republic of China Year Book 1991-1992*, China Publishing Company, Taipe, 1993 ✓
- An, *The China of Chiang Kai Shek*, Word Peace Foundation, Massachusetts, 1976
- An, *The Taiwan Question and reunification of China*, Taiwan Affairs Office & Information Office State Council, Beijing , August 1993. ✓
- An, *US Defence Secretary Brown's Statement On US-China ? Taiwan Policy*, Washington Viewpoint, US Embassy, Jakarta, February 7, 1979,
- An, *US. Foreign Policy 1972*, A Report of the Secretary of State, Washington DC, 1981



- A. R. Sutopo Hadi dan Soezastro, *Strategi dan Hubungan Internasional : Indonesia di Kawasan Asia-Pasifik*, CSIS, Jakarta, 1981,
- Colin Mac. Andrews & Mochtar Mas'oe'd (ed), *Perbanāngan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1978,
- Daniel Goleman, *Emotional Intelligence*, Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- David S. G. Goodman & Gerald Segal, eds, *China Deconstructs : Politics, Trade and Regionalism*, Routledge, London, 1994, -
- Guocang Huan, *Changng China-Taiwan Relations*, dalam Lin & Robinson, ed. *The Chinese and Future : Beijing, Taipe and Hongkong*, The AEI Press, Washington, D.C, 1954,
- Harold C. Hinton, *Segitiga AS-China-Soviet dan Asia Tenggara*, LEMHANAS, 7 November 1978 ,
- Hungdah Chiu, *China, The United State and The Question of Taiwan : Documents and Analysis*, Praeger, New York, 1973,
- Jack Beiden, *Naga Merah Lahirnya Sebuah Negara Rakyat Yang Menggetarkan Dunia*, terjemahan Mr. Sumarto Djoyediharjo, NV. Penerbit W. van Hoeve, Bandung, 1952,
- Jack C. Plano, dkk, *Kamus Analisa Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- James C. F. Wang, *Contemporary Chinese Politics : An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc. 1980, .
- James Mayall, *Nationalism and International Society*, Cambridge University Press Cambridge, 1990.
- Kenneth W allen, Glenn Krumel & Jonathan D. Pollack, *China 's Air Force Enter the 21<sup>st</sup> Century*, RAND, 1995
- K.J. Holsti, *Politik Internasional*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987.
- Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1975.

- Lie Tek Tjeng**, *Study wilayah Pada Umumnya dan Asia Timur Pada Khususnya, jilid II*, Alumni Bandung, 1977,
- Marzuki**, *Metodologi Riset*, BPFE UII, Yogyakarta, 1982,
- Moh. Hatta**, *Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1954.
- Mohtar Mas'ood**, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Ralf Dahrendorf**, *Conflict Groups, Group of Conflict and Social Change*, disunting oleh **Ramelan Subekti**, PT. Gramedia, Jakarta, 1992.
- Ramon H. Myers (ed)**, *Two Chinese States : U.S. Foreign Policy and Interest*, Hoover Institution Press, California, 1979,
- \_\_\_\_\_, *A Unique Relationship, dalam Myers, ed, The United States and the Republic of China Under Taiwan Relations Act*, Hoover Institution Press, Stanford, 1992.
- Robert L. Downen**, *The Tattret China Card, "Reality or Illusion United States Strategy ?"*, Preager, New York ,1984,
- Schlesinger**, *Dynamic of Word Power, Documentary History of US Foreign Policy since 1945-1975*, Chelsea House, Mac. Graw Hill, 1979
- Soetrisno Hadi**, *Metodologi Research*, penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980,
- The Liang Gie**, *Ilmu Politik*, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta, 1986,
- Umar Kayam**, *Mangan Ora Mangan Kompul*, Gramedia Pustaka Utama 1994.
- Walter S. Jones**, *Logika Internasional I*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 1992,

**W. G. Goddrad**, *The Makers of Taiwan*, China Publishing Company, Taipei, China, 1981

**William J. Barnd. (ed)**, *China and Amerika : The Search for a New Relationship*, A Council on Foreign Relation Book, New York , 1988

**Winarno Surachmad**, *Dasar-Dasar Teknik Research*, CV. Tarsito, Bandung, 1975.

**Yung Hwan Jo**, *Taiwan's Future*, Center for Asia Studies Arizona University, Arizona, 1977

#### Jurnal Dan Terbitan Berkala

*Analisa*, Tahun VIII, No. 1, 1979, CSIS.

*Analisa*, Tahun X, No. 4, April 1981, CSIS.

**An Bing**, *Report from China : A Review on China's Taiwan Policies*, dalam *China Strategy Review*, no. 2, Maret 1996

**Bib-jaw Lin**, *Rising Political Status from Economic Edge : The Expansion of Taipei's Foreign Relations from the Point of View of Cross-Strait Exchanges*, dalam *Issues & Studies* vol 27, no 10, October 1991,

**Chen Shen Yen**, *Socioeconomic Exchange and competitions as a Transition toward Peaceful Reunification of China*, dalam *Asian Affairs*, vol 14 no4, Winter 1987-1988,

**Chien Min Chao**, *David and Goliath : A Comparison of Reunification politicien Between Mainland China -Taiwan*, dalam *Issues & Studies*, vol. 3, no. 27, July 1994.

*China, the U.S and Taiwan of Copyrights and Human Right*, dalam *Taiwan Comunique*, no. 65, April 1995.,,

- Chong pin Lin**, The Military Balance in The Taiwan Straits, dalam *The China Quarterly*, no 146, , June 1996.
- Contemporary Southeast Asia*, vol 18, no. 1, Juni 1996,
- James Chul-yul Soong**, *Political Development in the Republic of China 1985-1992*, dalam *World Affairs*, vol 155, no 2, Fall 1992,
- John Quansheng Zhao**, *An Analysis of Unification*, dalam *Asian Survey*, vol. XXIII, no. 10, October 1983,
- Parris H. Chang**, *China 's Relations with Hongkong and Taiwan*, dalam *ANNALS*, no. 519, January 1992,
- R. Siti Zuhro**, *Politik Reunifikasi Beijing Terhadap Taipei*, dalam *Jurnal Ilmu Politik* 4, AIPI dan LIPI, PT. Gramedia, 1989
- Sullivan and Frank S. T. Hsio**, *The Politic of Reunification: Beijing's initiative on Taiwan*, dalam *Asian Survey*, vol XX, no. 8 august 1980.
- Thomas B. Gold** , *The Status Quo is not Static : Mainland-Taiwan Relations*, dalam *Asian Survey* Vol XXVIII no. 3, Maret 1987
- Ying-jeou Ma**, *The Republic of China' s policy Toward the Chinese Mainland*, dalam *Issues & Studies* vol. 28, no 2, Februari 1992,
- Vincent Wei-Cheng Wang**. *Does Democratization Enhance or Reduce Taiwan's Security ?*, dalam *Asian affairs : An American Review*, no. 23, 1996
- Wen-hui Tsai**, *Convergence and Divergence between Mainland China - Taiwan : The Future of Unification*, dalam *Issues & Studies*, vol. 27 , no 12, Desember 1991,
- Miriam Budiharjo**, *Pendekatan-Pendekatan Dalam Ilmu Politik*, dalam *Jurnal Ilmu Politik* I, PT. Gramedia, Jakarta
- Persepsi*, Untuk Mengamankan Pancasila, Tahun I, No 2, Juli-Agustus 1979.

**Koran Dan Majalah**

*Beijing Review*, vol 35, no. 43, October 1992

\_\_\_\_\_, vol. 24, no 33 October 1981,

*Far Eastern Economic Review*, 16 maret 1979

*Foreign Broadcast Information Service*, 30 September 1986,

*Kompas*, 26 April 1991,

\_\_\_\_\_, 24 Desember 1991,

\_\_\_\_\_, 12 April 1995,

\_\_\_\_\_, 2 Januari 1996.

\_\_\_\_\_, 8 Januari 1996,

\_\_\_\_\_, 28 Januari 1996

\_\_\_\_\_, 12 Maret 1996.

\_\_\_\_\_, 21 Mei 1996

*Media Indonesia*, 27 Januari 1996

*New York Times*, January 25, 1996.

*Republika*, 3 Januari 1996

\_\_\_\_\_, 10 Maret 1996

\_\_\_\_\_, 26 Mei 1996

*People's Daily*, May 24, 1996

*Suara Pembaharuan*, 28 Maret 1996.

*Tempo*, 3 September 1977,

*U.S. News and World Report*, Sunday October 23, 1995

*U.S. Departement of State Buletin*, 20 Maret 1972,

Lampiran 1.

Peta Cina dan Taiwan



## CONTINUE TO PROMOTE THE REUNIFICATION OF THE MOTHERLAND

Comrades and friends,

Following the celebration of the 1995 New Year's Day, the people of all ethnic groups in China are now seeing in the Spring Festival. On the occasion of this traditional festival of the Chinese nation, it is of great significance for the Taiwan compatriots in Beijing and other personages concerned to be gathered here to discuss the future of the relations between the two sides of the Taiwan Straits and the great cause of the peaceful reunification of the motherland. On behalf of the Central Committee of the Communist Party of China and the State Council, I should like to take this opportunity to wish our 21 million compatriots in Taiwan a happy New Year and the best of luck.

Taiwan is an integral part of China. A hundred years ago on April 17, 1895, the Japanese imperialists, by waging a war against the corrupt government of the Qing Dynasty, forced the latter to sign the Shimonoseki Treaty of national betrayal and humiliation. Under the treaty, Japan seized Taiwan and the Penghu Islands, subjecting the people of Taiwan to its colonial rule for half a century. The Chinese people will never forget this humiliating chapter of their history. Fifty years ago, together with the people of other countries, the Chinese people defeated the Japanese imperialists. October 25, 1945 saw the return of Taiwan and the Penghu Islands to China marked the end of Japan's colonial rule over our compatriots in Taiwan. However, for reasons everybody knows, Taiwan has been severed from the Chinese mainland since 1949. It remains the sacred mission and lofty goal of the entire Chinese people to achieve the reunification of the motherland and promote the all-round revitalisation of the Chinese nation.

Since the Standing Committee of the National People's Congress issued its "Message to the Taiwan Compatriots" in January 1979, we have formulated the basic principles of peaceful reunification and "one country, two systems" and a series of policies towards Taiwan. Comrade Deng Xiaoping, the chief architect of China's reform and opening to the outside world, is also the inventor of the great concept of "one country, two systems". With foresight and seeking truth from facts, he put forward a series of important theories and ideas concerning the settlement of the Taiwan question which reflect the distinct features of the times, and defined the guiding principles for the peaceful reunification of the motherland.

Comrade Deng Xiaoping has pointed out that the most important issue is the reunification of the motherland. All descendants of the Chinese nation wish to see China reunified. It is against the will of the Chinese nation to see it divided. There is only one China, and Taiwan is a part of China. We will never allow there to be "two Chinas" or "one China, one Taiwan". We firmly oppose the "independence of Taiwan". There are only two ways to settle the Taiwan question: One is by peaceful means and the other is by non-peaceful means. The way the Taiwan question is to be settled is China's internal affairs, and brooks no foreign interference. We consistently stand for achieving reunification by peaceful means and through negotiations. But we shall not undertake not to use force. Such commitment would only make it impossible to achieve peaceful reunification and could not but lead to the eventual settlement of the question by the use of force. After Taiwan is reunified with the mainland, China will pursue the policy of "one country, two systems". The main part of the country will stick to the socialist system, while Taiwan will retain its current system. Reunification does not mean that the mainland will swallow up Taiwan, nor does it mean that Taiwan will swallow up the mainland. After Taiwan's reunification with the mainland, its social and economic systems will not change, nor will its way of life and its non-governmental relations with foreign countries, which means that foreign investment in Taiwan and the non-governmental exchanges between Taiwan and other countries will not be affected. As a special administrative region, Taiwan will exercise a high degree of autonomy and enjoy legislative and independent judicial power, including that of final adjudication. It may also retain its armed forces and administer its party, governmental and military systems by itself. The Central Government will not station troops or send administrative personnel there. What is more, a number of posts in the Central Government will be made available to Taiwan.

Over the past decade and more, under the guidance of the basic principles of peaceful reunification and 'one country, two systems' and through the concerted efforts of the compatriots on both sides of the Taiwan Straits and in Hong Kong and Macao and Chinese residing abroad, visits back and forth by individuals and exchanges in science, technology, culture, academic affairs, sports and other fields have expanded vigorously. A situation in which the economies of the two sides promote, complement and benefit each other is taking shape. The establishment of direct links between the two sides for postal, air, and shipping services at an early date not only represents the strong desire

of vast numbers of compatriots in Taiwan, particularly industrialists and businessmen, but has also become the actual requirement for future economic development in Taiwan. Progress has been registered in the negotiations on specific issues, and the "Wang Daohan - Koo Chenfu talks" represent an important, historic step forward in the relations between the two sides.

However, what the entire Chinese people should watch out for is the growing separatist tendency and the increasingly rampant activities of the forces working for the "independence of Taiwan" on the island in recent years. Certain foreign forces have further meddled in the issue of Taiwan, interfering in China's internal affairs. All this not only impedes the process of China's peaceful reunification but also threatens peace, stability and development in the Asia-Pacific region.

The current international situation is still complex and volatile, but in general, it is moving towards relaxation. All countries in the world are working out their economic strategies which face the future and taking it as a task of primary importance to increase their overall national strength so as to take up their proper places in the world in the next century. We are pleased to see that the economies of both sides are growing. In 1997 and 1999 China will resume its exercise of sovereignty over Hong Kong and Macao respectively, which will be happy events for the Chinese people of all ethnic groups, including our compatriots in Taiwan. The Chinese nation has experienced many vicissitudes and hardships, and now it is high time to accomplish the reunification of the motherland and bring about its all-round rejuvenation. This means an opportunity for both Taiwan and the entire Chinese nation. Here, I should like to state the following views and propositions on a number of important questions that have a bearing on the development of relations between the two sides and the promotion of the peaceful reunification of the motherland:

1. Adherence to the principle of one China is the basis and premise for peaceful reunification. China's sovereignty and territory must never be allowed to suffer split. We must firmly oppose any words or actions aimed at creating an "independent Taiwan" and the propositions "split the country and rule under separate regimes", "two Chinas over a certain period of time", etc., which are in contravention of the principle of one China.

2. We do not challenge the development of non-governmental economic and cultural ties by Taiwan with other countries. Under the principle of one China and in accordance with the charters of the relevant international organisations, Taiwan has become a member of the Asian Development Bank, the Asia-Pacific Economic Co-operation forum and other international economic organisations in the name of "Chinese Taipei". However, we oppose Taiwan's activities in "expanding its living space internationally" which are aimed at creating "two Chinas" or "one China, one Taiwan". All patriotic compatriots in Taiwan and other people of insight understand that instead of solving the problems, such activities can only help the forces working for the "independence of Taiwan" undermine the process of peaceful reunification more unscrupulously. Only after the peaceful reunification is accomplished can the Taiwan compatriots and other Chinese people of all ethnic groups truly and fully share the dignity and honour attained by our great motherland internationally.

3. It has been our consistent stand to hold negotiations with the Taiwan authorities on the peaceful reunification of the motherland. Representatives from the various political parties and mass organisations on both sides of the Taiwan Straits can be invited to participate in such talks. I said in my report at the Fourteenth National Congress of the Communist Party of China held in October 1992, "On the premise that there is only one China, we are prepared to talk with the Taiwan authorities about any matter, including the form that official negotiations should take, a form that would be acceptable to both sides". By "on the premise that there is only one China, we are prepared to talk with the Taiwan authorities about any matter", we mean naturally that all matters of concern to the Taiwan authorities are included. We have proposed time and again that negotiations should be held on officially ending the state of hostility between the two sides and accomplishing peaceful reunification step by step. Here again I solemnly propose that such negotiations be held. I suggest that, as the first step, negotiations should be held and an agreement reached on officially ending the state of hostility between the two sides in accordance with the principle that there is only one China. On this basis, the two sides should undertake jointly to safeguard China's sovereignty and territorial integrity and map out plans for the future development of their relations. As regards the name, place and form of these political talks, a solution acceptable to both sides can certainly be found so long as consultations on an equal footing can be held at an early date.

4. We should strive for the peaceful reunification of the motherland since Chinese should not fight fellow Chinese. Our not undertaking to give up the use of force is not directed against our compatriots in Taiwan but against the schemes of foreign forces to interfere with China's reunification and to bring about the "independence of Taiwan". We



are fully confident that our compatriots in Taiwan, Hong Kong and Macao and those residing overseas would understand our principled position.

5. In face of the development of the world economy in the twenty-first century, great efforts should be made to expand the economic exchanges and co-operation between the two sides of the Taiwan Straits so as to achieve prosperity on both sides to the benefit of the entire Chinese nation. We hold that political differences should not affect or interfere with the economic co-operation between the two sides. We shall continue to implement over a long period of time the policy of encouraging industrialists and businessmen from Taiwan to invest in the mainland and enforce the Law of the People's Republic of China for Protecting the Investment of the Compatriots of Taiwan. Whatever the circumstances may be, we shall safeguard the legitimate rights and interests of industrialists and businessmen from Taiwan. We should continue to expand contacts and exchanges between our compatriots on both sides so as to increase mutual understanding and trust. Since the direct links for postal, air and shipping services and trade between the two sides are the objective requirements for their economic development and contacts in various fields, and since they are in the interests of the people on both sides, it is absolutely necessary to adopt practical measures to speed up the establishment of such direct links. Efforts should be made to promote negotiations on certain specific issues between the two sides. We are in favour of conducting this kind of negotiations on the basis of reciprocity and mutual benefit and signing non-governmental agreements on the protection of the rights and interests of industrialists and businessmen from Taiwan.

6. The splendid culture of five thousand years created by the sons and daughters of all ethnic groups of China has become ties keeping the entire Chinese people close at heart and constitutes an important basis for the peaceful reunification of the motherland. People on both sides of the Taiwan Straits should inherit and carry forward the fine traditions of the Chinese culture.

7. The 21 million compatriots in Taiwan, whether born there or in other provinces, are all Chinese and our own flesh and blood. We should fully respect their life style and their wish to be the masters of our country and protect all their legitimate rights and interests. The relevant departments of our party and the government including the agencies stationed abroad should strengthen close ties with compatriots from Taiwan, listen to their views and demands, be concerned with and take into account their interests and make every effort to help them solve their problems. We hope that Taiwan Island enjoys social stability, economic growth and affluence. We also hope that all political parties in Taiwan will adopt a sensible, forward-looking and constructive attitude and promote the expansion of relations between the two sides. All parties and personages of all circles in Taiwan are welcome to exchange views with us on relations between the two sides and on peaceful reunification and are also welcome to pay a visit and tour places. All personages from various circles who have contributed to the reunification of China will go down in history for their deeds.

8. Leaders of the Taiwan authorities are welcome to pay visits in appropriate capacities. We are also ready to accept invitations from the Taiwan side to visit Taiwan. We can discuss state affairs, or exchange ideas on certain questions first. Even a simple visit to the other side will be useful. The affairs of Chinese people should be handled by ourselves, something that does not take an international occasion to accomplish. Separated across the Straits, our people eagerly look forward to meeting each other. They should be able to exchange visits, instead of being kept from seeing each other all their lives.

Our compatriots in Hong Kong and Macao and those residing overseas have made dedicated efforts to promote the relations between the two sides, the reunification of the country and the revitalisation of the Chinese nation. Their contribution commands recognition. We hope that they will make new contributions in this regard.

The reunification of the motherland is the common aspiration of the Chinese people. The patriotic compatriots do not wish to see reunification delayed indefinitely. The great revolutionary forerunner of the Chinese nation Dr. Sun Yat-sen once said: 'Reunification is the hope of entire nationals in China. If reunification can be achieved, the people of the whole country will enjoy a happy life; if it cannot be achieved, the people will suffer.' We appeal to all Chinese to unite and hold high the great banner of patriotism, uphold reunification, oppose secession, spare no effort to promote the expansion of relations between the two sides and facilitate the accomplishment of the reunification of the motherland. In the course of the development of the Chinese nation in the modern world, such a glorious day will surely come.

**Sumber : Cina, The US and Taiwan of Copy Rights and Human Right.**